



VOLUME 15 NO 1 | FEBRUARI 2016

mediaBPP

Jendela Informasi Kelitbangan

MEV

Volume 04, Issue 1, July 2013



PERJALANAN PANJANG AKREDITASI JURNAL ELEKTRONIK

AKTIVITAS

Kegiatan Orientasi dan Tusi Aparatur BPP Kemendagri
Mengikis *Mental Block*
Menuju Perubahan Mental Aparatur

DAERAH

Hapus Perda Tidak Semudah
Membalikkan Telapak Tangan



<http://bpp.kemendagri.go.id>
Majalah Dwi Bulanan
ISSN 1410-4210



**SELALU
ADA
LITBANG
DIBALIK
KEBIJAKAN
YANG
TEPAT
SASARAN**

TERWUJUDNYA KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI
YANG BERKUALITAS BERDASARKAN
HASIL PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

PENGANTAR REDAKSI

Salam Redaksi ...

Pada awal 2016, Menteri Dalam Negeri mengatakan, "Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) seolah antara ada dan tiada". Tentunya ini menjadi tamparan telak sekaligus pecutan bagi kami untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas negara. Kepercayaan BPP menjadi sebuah landasan suatu kebijakan tentunya merupakan salah satu poin penting penilaian terhadap peran BPP yang sesungguhnya.

Tanpa menolak kritik, kami terus melangkah maju menciptakan cita-cita mulia tersebut melalui hasil penelitian yang dituangkan dalam wadah bernama "Jurnal Bina Praja". Melalui Jurnal Bina Praja inilah, segala keilmuan, informasi, dan perkembangan peradaban politik dan kemajuan pemerintah dituangkan berdasarkan penelitian, dan karya ilmiah yang tidak main-main. Namun sayang, tidak semua informasi bebas masuk dalam jurnal, kami mencoba hadir dengan bentuk lain, yaitu media yang lebih populer, majalah. Pada 2016 ini, kami tampil dengan wajah baru. Mengusung tagline "Jendela Informasi Kelitbangan", kami mencoba menjembatani informasi

di balik dapur BPP. Kali ini, mulai dari akreditasi, produk yang dihasilkan, hingga sejarah panjang jurnal elektronik yang mulai diterapkan pada 1 April 2016 ini coba diketengahkan. Semuanya kami kemas dengan tampilan baru, wajah baru, dan semangat baru 2016.

Berisi lebih dari 14 rubrik, dengan komposisi 60 persen kelitbangan, dan 40 persen informasi umum kami hadir dengan tampilan segar yang menyuguhkan ikon BPP Kemendagri lewat komik "Bang Pepe". Komik Bang Pepe ini akan menceritakan tentang kritik sosial kejadian fenomenal di Indonesia. Tidak hanya itu, untuk merileks-kan sejenak mata pembaca, beragam rubrik juga menjadi sisipan kami. Seperti Gaya Hidup, Sastra, Resensi Buku dan Film. Semuanya redaksi suguhkan demi memuaskan para pembaca Media BPP.

Akhir kata, redaksi berharap dengan tampilan baru ini BPP tidak lagi dianggap sebagai "Antara Ada dan Tiada" tapi "Selalu Ada dan Tetap Ada".

Redaksi MediaBPP

mediaBPP

PELINDUNG

Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo

PENANGGUNG JAWAB

Domoe Abdie

PEMIMPIN REDAKSI

Jonggi Tambunan

REDAKTUR PELAKSANA

Moh. Ilham A. Hamudy

REDAKTUR

Syabnikmat Nizam
Subiyono
Rochayati Basra
Indrajaya Ramzie

PENYUNTING

Bungaran Damanik
Frisca Natalia
Elpino Windy
Niyan Nurin Ridha Putri

PELIPUTAN

M. Saidi Rifky
Indah F. Rosalina

PENATA LETAK DAN GRAFIS

Elpino Windy

SIKERJA

Kementerian Dalam Negeri pada awal tahun ini membuat aplikasi SIKERJA untuk mendukung ke-disiplinan serta mengukur kinerja para pegawai di lingkungan Kemendagri. Saya sangat setuju dengan adanya aplikasi ini, karena aplikasi ini dapat mengukur kinerja pegawai tiap harinya, sehingga tunjangan kinerja yang diperoleh sesuai dengan laporan kinerja yang diisi pada aplikasi tersebut tiap harinya. Saya berharap aplikasi SIKERJA ini terus dikembangkan. Misalnya bisa diakses dalam bentuk aplikasi android, sehingga saat tugas keluar, laporan kerja bisa diisi di mana saja. Saya sangat mendukung aplikasi karena dengan SIKERJA, pegawai bisa memperoleh tunjangan yang sesuai dan meningkatkan kedisiplinan.

Frisca Natalia

Sub Bagian Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi.

Pada Februari 2016, Kementerian Dalam Negeri memang membuat kebijakan baru untuk melihat kinerja PNS secara transparan melalui SIKERJA di masa yang akan datang. Aplikasi SIKERJA juga bisa diakses melalui android. Mbak Frisca bisa langsung datang ke pos pemasangan aplikasi di bagian PJKSE atau bisa download langsung di Google Apps. Untuk lebih jelasnya, silakan Mbak Frisca baca di halaman 16, rubrik AKTIVITAS.

Menanti Perpustakaan Ideal

Perpustakaan bisa diungkapkan sebagai gudangnya buku. Tidak jauh berbeda pula dengan perpustakaan BPP Kemendagri, sangat disayangkan jika para peneliti tidak ada kontribusinya untuk memperkaya tulisan. Namun kenyataannya, belum ada buku andalan yang masuk di Perpustakaan untuk menunjang penelitian. Di saat ingin meminjam dan membaca buku, tidak ada akses yang mudah dan tempat untuk membaca. Padahal membaca buku di perpustakaan, banyak manfaatnya. Bagaimana mau membaca buku di perpustakaan, jika keadaannya dan kondisinya seperti ini, Jadi, saya mohon BPP Kemendagri meresponnya.

Bungaran Damanik Bagian Umum

Betul sekali pak Bungaran, perpustakaan memang

gudangnya buku. Rencananya, perpustakaan akan berada di lantai 1 gedung baru dan dikonsep seperti perpustakaan standar nasional dengan menerapkan sistem e-library, dan ada penambahan sejumlah buku yang akan menjadi sumber referensi para peneliti di BPP Kemendagri. Untuk lebih lengkapnya, bapak bisa membacanya di portal kami <http://bpp.kemendagri.go.id/bpp-kemendagri-akan-memunyai-perpustakaan-baru/atau> bisa membaca rubrik AKTIVITAS pada halaman 14.

Senang Magang di BPP Kemendagri

Pada 1 Februari 2016, saya Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPP Kemendagri Jakarta Pusat, Pada hari itu, Saya praktik di Sub Bagian Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi.

Harapan saya, setelah selesai PKL saya dapat lebih giat lagi dalam mengerjakan tugas sekolah. BPP Kemendagri ini sangat bagus dan kreatif di Sub Bagian Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi. Begitu juga dengan bidang yang lainnya.

Ahmad Sauqy

Siswa SMK Muhammadiyah 7 Jakarta

Terima kasih Sauqy, BPP Kemendagri memang selalu membuka pintu bagi para pelajar yang ingin praktek magang di kantor kami. Semoga setelah magang di sini, Sauqy dan teman-teman mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di masa depan.

NOTE

**Redaksi Media BPP Kemendagri
mengundang Anda
untuk menulis**

**Surat Pembaca dan Opini.
Surat Pembaca dapat dilampirkan
melalui email sebanyak halaman,
sementara Opini ditulis sebanyak
6.000 karakter.**

**Semuanya dikirim ke email redaksi:
mediabppkemendagri@gmail.com
dengan subyek
SURAT PEMBACA atau OPINI.**

- 3 **PENGANTAR & SUSUNAN REDAKSI**
- 4 **SURAT PEMBACA**
- 6 **LAPORAN UTAMA**
Perjalanan Panjang Akreditasi Jurnal Elektronik
- 12 - 21 **AKTIVITAS**
- DAERAH**
- 23 Kisah 1 Muharam di Desa Pelauw
- 25 Swasembada Pangan di Merauke
- 26 Hapus Perda Tidak Semudah Membalikkan Telapak Tangan
- 28 - 29 **JEPRET**
- 38 - 39 **KOMIK**
- 31 **LEBIH DEKAT**
Philips J. Vermonte: "Jadi Peneliti Itu Harus Aktif Menulis!"
- 34 **PROFIL BALITBANGDA**
Bidang Litbang dan Statistik Kabupaten Jombang
Menjadi Acuan Pembangunan Pertanian
- GAYA HIDUP**
- 40 Generasi Millenial Ingat 5S 4J
- 42 Sigi Wimala: Cinta Mati dengan Lari
- 44 **SASTRA**
Hanya Tukang Becak
- RESENSI**
- 47 Karya Tulis Ilmiah
- 48 Film
- 50 Buku
- 51 **OPINI**
Cerita dari 6 Desa
- 54 **KILAS BERITA**
- 58 **CATATAN**
Jokowi, antara Keperkasaan dan Kekhawatiran



6

LAPORAN UTAMA
Perjalanan Panjang
Akreditasi Jurnal Elektronik



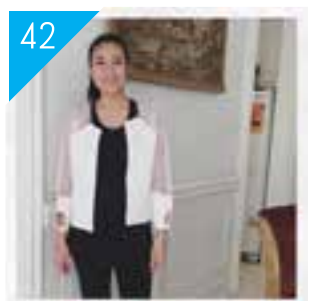
18

AKTIVITAS
Mengikis *Mental Block*
Menuju Perubahan Mental Aparatur



25

DAERAH
Swasembada Pangan di Merauke



42

GAYA HIDUP
Sigi Wimala: Cinta Mati dengan Lari

LAPORAN UTAMA

PERJALANAN PANJANG AKREDITASI JURNAL ELEKTRONIK



Perjalanan jurnal akreditasi berawal pada 1975-an. Saat LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) memberikan klasifikasi jurnal terbitan lembaga-lembaga litbang di Indonesia dengan melihat isi dan substansi terbitan.

Manajer Layanan Perpustakaan PDII – LIPI, Wahid Nashihuddin, mengatakan pada masa sebelumnya, jurnal baru dikenal sebagai ilmiah, semi ilmiah, jurnal populer, dan populer. “Lalu baru diberikan standar ISSN (International Standard Serial Number) dengan berbagai klasifikasi,” katanya saat Tim Media BPP menyambangi kantornya (27/1).

Sejarah Singkat Akreditasi

Pada 2005 LIPI mengeluarkan Pedoman Akreditasi Majalah Il-

mengatur persyaratan akreditasi, terutama soal frekuensi dan mitra bestari.

Ada dua hal yang berbeda dari peraturan lama dengan peraturan baru. Pada peraturan 2005, jumlah yang telah diterbitkan paling sedikit empat terbitan berurutan, sementara pada peraturan 2011

baik dari peneliti terdahulu, karena mereka saat ini lebih tertata dengan baik. Kalau zaman dahulu bisa saja seorang peneliti bersikap maunya sendiri, dia meneliti, menulis, dan mengajukan ide penelitian. Padahal tidak ada manfaatnya. Sekarang tidak bisa begitu, Ia harus pada posisi lem-



Husein Avicenna
Kepala Pusbindiklat LIPI

Perbedaan dua peraturan itu, tidak hanya berlaku pada lembaga litbang yang mengajukan akreditasi, tetapi juga instrumen penilaian dan masa berlakunya. Pada 2012, misalnya, kategori jurnal terakreditasi hanya berlaku selama tiga tahun dengan dua kriteria penilaian. Yakni, terakreditasi (nilai total = 70) dan tidak terakreditasi (nilai total < 70).

miah melalui Peraturan Kepala LIPI No 01/E/2005, sebagai bentuk tanggung jawab LIPI yang merupakan instansi pembina jabatan fungsional. Dalam peraturan tersebut baru diatur mengenai isi tulisan, ISSN, jumlah yang diterbitkan, jumlah cetakan, dan jumlah naskah. Dalam peraturan itu belum dituliskan terkait mitra bestari dan frekuensi penerbitan. Barulah pada 2011, LIPI merevisi Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah melalui Peraturan LIPI No 04/E/2011 yang banyak

paling sedikit enam terbitan. Begitu pula dengan jumlah naskah tiap terbitan. Pada peraturan 2005 dituliskan paling sedikit lima naskah, dan paling banyak 50 naskah setiap terbitan. Sementara pada peraturan 2011 paling sedikit lima naskah panjang, dan naskah pendek paling banyak tiga buah.

Menurut, Kepala Pusbindiklat LIPI, Husein Avicenna, hal itu dikarenakan peneliti dahulu berbeda dengan peneliti sekarang. “Peneliti sekarang lebih

bagus kinerjanya, dan melakukan penelitian,” ungkap Avicenna saat ditemui di LIPI Cibinong.

Perbedaan dua peraturan itu, tidak hanya berlaku pada lembaga litbang yang mengajukan akreditasi, tetapi juga instrumen penilaian dan masa berlakunya. Pada 2012, misalnya, kategori jurnal terakreditasi hanya berlaku selama tiga tahun dengan dua kriteria penilaian. Yakni, terakreditasi (nilai total ≥ 70), dan tidak terakreditasi (nilai total < 70). Sejarah LIPI mencatat per

Agustus 2013 ada 171 jurnal ilmiah yang telah terakreditasi. Hampir seluruh jurnal pada saat itu diterbitkan secara cetak, dan hanya beberapa yang sudah menerapkan elektronik.

Mengapa akreditasi penting?

Tim Media BPP menyambangi beberapa kementerian dalam peliputan ini, di antaranya adalah Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Keuangan. Mereka yang kami temui sepakat jika jurnal akreditasi menjadi penting untuk menentukan kualitas suatu jurnal.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof. Dr. Abdul Rahman Mas'ud mengatakan, ada tiga hal yang membuat jurnal terakreditasi itu penting. "Pertama supaya ada standarisasi, yang kedua menjaga kualitas penulisan agar orang tidak seandainya sendiri, ketiga sebagai kompetisi si penulis untuk berlomba-lomba diterbitkan di jurnal," kata Mas'ud.

Jurnal terakreditasi juga menjadi syarat angka kredit bagi peneliti, pegawai negeri, atau dosen yang ingin naik jabatan. Menurut Moh. Ilham A Hamudy, Kepala Sub Bagian Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi BPP Kemendagri, jurnal nasional yang terakreditasi memiliki angka kredit 25, sedangkan yang tidak terakreditasi hanya bernilai 5. "Jika seorang pegawai negeri ingin cepat naik pangkat, maka dia tentu akan berlomba menulis di jurnal yang sudah terakreditasi, karena selisih angka kreditnya jauh sekali dengan yang belum terakreditasi," ungkapnya.

Semakin banyak, mereka yang menuliskan di jurnal terakreditasi, semakin cepat mereka naik jabatan. Apalagi jika mereka menuliskannya



Abdul Rahman Mas'ud

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

di Jurnal Internasional bereputasi maka dengan angka kredit 40.

Sebenarnya menurut Wahid, hanya di Indonesia saja lah jurnal harus terakreditasi. "Orang luar negeri tidak mengenal akreditasi. Akreditasi hanya ada di Indonesia. Mengapa Indonesia harus akreditasi? Karena untuk menyesuaikan ketentuan jurnal seluruh dunia. Kita itu mengadopsi ketentuan internasional agar para peneliti Indonesia memunyai standar dalam penelitian," jelas Wahid.

Permasalahan Jurnal Akreditasi

Bagi sebagian lembaga litbang, atau perguruan tinggi mendapatkan jurnal terakreditasi tidaklah mudah. Bahkan tidak sedikit lembaga penerbitan jurnal dikatakan 'mandeg', atau 'antara ada dan tiada'. Data LIPI mencatat, tiap tahun ada sekira 7.000 jurnal yang diterbitkan dari seluruh Indonesia, namun hanya ada 300 jurnal yang terakreditasi. Itu artinya hanya 4,3 persen jurnal di Indonesia yang tel-

ah terakreditasi.

"Ada banyak sekali faktor, mengapa banyak jurnal tidak terakreditasi. Tapi ada dua hal pokok yang biasanya kami temukan. Pertama masalah manajemen pengelola jurnal dan masalah kepenulisan," kata Wahid.

Konsistensi manajemen pengelola jurnal menjadi taruhan utama sebuah jurnal bisa terus produktif dan berkualitas. Masalah kebijakan lembaga induk penerbit jurnal itu biasanya terkait proses administrasi penerbitan. "Biasanya mereka tidak punya dewan editor yang *credible*, sementara syarat dewan editor minimal harus memunyai karya tulis. Kedua, tidak mendapatkan *reviewer* (mitra bestari) yang kompeten di bidang keilmuannya, syarat penilaian kami *reviewer* harus orang yang pernah nulis buku dan harus terindeks di Scopus. Lalu, tidak ada SDM yang konsisten mengembangkan jurnal," jelas Wahid.

Rupanya saat kami telusuri, permasalahan *reviewer* yang tidak *credible* ini juga dilatarbelakangi mas-

alah honor antara editor dan mitra bestari yang tidak pantas. Menurut PMK RI (Peraturan Menteri Keuangan) No 65/PMK 02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2016 mengatakan honor mitra bestari sebesar Rp 1,7 juta sedangkan editor hanya mendapatkan honor Rp 350 ribu. “Perbedaan itu tentu sangat jauh sekali. Editor harus memeriksa semua naskah yang masuk ke redaksi, sementara mitra bestari hanya memeriksa 2-3 naskah yang terkait bidang kepakarannya saja,” kata Ilham.

Permasalahan itu juga ditemukan di Kementerian Agama. “Semua sudah ada standarnya. Namun bisa disiasati. Mereka (editor dan mitra bestari - *red*) bisa kami jadikan sebagai narasumber atau penceramah di seminar-seminar. Masa *iya* orang besar seperti profesor kita bayar kecil,” kata Mas’ud.

Namun seringkali maksud baik, dianggap jelek. Menurut beberapa pengelola jurnal Kementerian dan Lembaga yang Tim Media BPP jumpai, penggunaan anggaran untuk ‘menghargai’ kinerja editor dan mitra bestari menjadi laporan yang dilacak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai ‘temuan penyimpangan’. Tidak sedikit pula

lembaga litbang harus mengembalikan uang tersebut. “Padahal sepatutnya, honor editor dan mitra bestari bisa lebih layak karena untuk *m e n u n - j a n g* konsistensi dan kualitas produk suatu jurnal,” tambah Ilham.

Saat dikonfirmasi terkait Standar Biaya Masukan Anggaran 2016 sesuai No 65/PMK 02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran, Ketua Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK) Kementerian Keuangan, Dr. Hidayat Amir mengatakan, sebenarnya dukungan pendanaan bukanlah masalah utama. “Banyak peneliti yang bersedia menjadi editor, *reviewer* atau mitra bestari tanpa mengharapkan honor. Karena mereka menganggap bahwa tugas itu se-

Data LIPI mencatat, tiap tahun ada sekira 7.000 jurnal yang diterbitkan dari Indonesia, namun hanya ada 300 jurnal yang terakreditasi. Itu artinya hanya 4,3 persen jurnal di Indonesia yang telah terakreditasi.

bagai bagian dari aktivitas *serve to community*. Namun jika mampu untuk disediakan ini menjadi semacam bentuk penghargaan atas suatu kontribusi ilmiah. Saya kira besarnya merupakan hal yang relatif,” katanya.

Meskipun begitu, Hidayat juga menganggap honor tersebut belum proporsional dan belum memberikan insentif positif untuk memberikan pelayanan terbaik dalam



“Banyak peneliti yang bersedia menjadi editor, reviewer atau mitra bestari tanpa mengharapkan honor. Karena mereka menganggap bahwa tugas itu sebagai bagian dari aktivitas *serve to community*. Namun jika mampu untuk disediakan ini menjadi semacam bentuk penghargaan atas suatu kontribusi ilmiah. Saya kira besarnya merupakan hal yang relatif.”

Ketua Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK) Kementerian Keuangan - Dr. Hidayat Amir



“Publikasi ilmiah peneliti Indonesia pun dalam skala internasional masih dinilai rendah. Dari 60 ribu dosen dan peneliti, Indonesia hanya mampu menghasilkan 4 ribu karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal internasional per tahun, sangat jauh jika dibandingkan dengan negara Malaysia yang menghasilkan 60 s.d 70 ribu pertahun.”

Kasubid Fasilitas Jurnal Ilmiah Kemenristekdikti
- Suwitno

aktivitas ilmiah ini. Hal senada juga disampaikan oleh Kasubag Data Statistik Bagian Informasi dan Komunikasi Publik - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Marcellino. “Terkait honor itu bukan domain kami, tapi dari DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) atau Setjen, karena itu kan ada PMK nya setiap tahun, bisa diubah jika Badan Litbang di Kementerian mengusulkan menggunakan surat resmi dari Eselon I saja, mungkin seperti itu. Tapi asal alasannya harus jelas,” jelas Marcellino.

Selain masalah manajemen, masalah kepenulisan juga menjadi dasar masalah lembaga penerbitan jurnal. Seringkali lembaga penerbit jurnal menghadapi krisis penulis seperti yang terjadi pada Kementerian Agama dan BPP Kemendagri. “Kita pernah krisis naskah, dan terlambat terbit, bahkan kami pernah meminta orang LIPI untuk menulisnya. Saya orang yang selalu rewel jika jurnal melewati deadline penerbitan. Biasanya, saya menyiasatinya dengan mengoptimalkan internal litbang Kemenag sendiri, mereka tinggal dipoles sedikit bisa menyiasati ke-krisisan jurnal itu,” imbuh Mas’ud.

Sekalipun jurnal yang sudah terpercaya seperti jurnal di Kemenag, tetap saja krisis naskah pun bisa terjadi. “Ada juga jurnal yang sudah bagus tetapi tidak ada yang tertarik. Mungkin ada penulis yang dikecewakan karena tulisannya tidak dimuat. Tetapi intinya, lembaga penerbitan jurnal tersebut harus promosi besar-besaran dan melakukan kerja sama pertukaran naskah dalam satu bidang ilmu,” saran Wahid.

Untuk mengatasi hal tersebut, Wahid menyarankan agar pimpinan lembaga harus rajin menjalin kerja sama, terutama dengan *reviewer* (mitra bestari), karena kredibilitas *reviewer* akan menentukan keberlan-

jutan jurnal. Hal itu bisa dilakukan dengan promosi atau *call for paper*. Ada undangan konferensi yang menjaring naskah sebanyak-banyaknya. “Umumkan yang lulus seleksi, dan mengadakan kegiatan ilmiah yang terkait dengan penulisan artikel yang masuk ke jurnal sehingga bisa berlanjut terus,” jelas Wahid.

Selain masalah krisis naskah, menurut Suwitno, Kasubid Fasilitas Jurnal Ilmiah Kemenristekdikti, permasalahan yang sering terjadi di perguruan tinggi adalah kualitas penulisan. “Dari sisi kualitas harus ditingkatkan, yang membedakan jurnal dan majalah adalah ada proses penilaian. Sehingga tidak semua tulisan yang masuk bisa dijurnalikan. Kalau dari Kemenristekdikti sendiri mengutamakan kebaruan. Kalau tidak ada kajian yang baru buat apa meneliti,” ungkapnya.

Kepada Tim Media BPP, Suwitno mengatakan, publikasi ilmiah peneliti Indonesia pun dalam skala internasional masih dinilai rendah. Dari 60 ribu dosen dan peneliti, Indonesia hanya mampu menghasilkan 4 ribu karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal internasional per tahun, sangat jauh jika dibandingkan dengan negara Malaysia yang menghasilkan 60 s.d 70 ribu pertahun.

“Saat ini Indonesia sendiri memiliki 3.200 perguruan tinggi yang 98 di antaranya adalah perguruan tinggi negeri, semoga di masa yang akan datang ada peningkatan dari jumlah peneliti,” kata Suwitno.

***E-Journal*, siapkah?**

Bukan hal baru, ketika dua lembaga (LIPI dan Kemenristekdikti) menetapkan bahwa per 1 April 2016 semua jurnal harus dikelola secara elektronik. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 ten-



Wahid Nashihuddin
Manajer Layanan Perpustakaan
PDII-LIPI

tang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan juga sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No 1 Tahun 2014.

Melihat fakta jurnal Indonesia yang masih banyak belum terakreditasi, menjadi sebuah tantangan besar bagi para peneliti dan pengelola jurnal untuk siapkah beralih ke *e-journal*? Dari data Kemenristekdikti sendiri, dari 34.060 jurnal dalam satu tahun belakangan ini, hanya 218 yang terakreditasi secara cetak dan elektronik. Hanya beberapa yang siap elektronik.

Namun, menurut Suwitno, Kemenristek sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan di 14 regional Indonesia yang terdiri dari 700 pengelola jurnal “Di bulan Maret kami sebut itu sebagai masa transisi, kami masih menerima yang cetak. Tetapi pada bulan berikut kami tidak lagi terima yang cetak,” ujarnya.

Pelatihan yang diadakan oleh Kemenristekdikti, dilakukan berdasarkan minat daerah masing-masing. “Mereka yang mendaftarkan pada kami. Lalu kami akan lihat daerah mana yang sudah siap baik dari segi kualitas dan server, daerah yang tertinggal bisa ikut ber-

gabung. Tentunya kita membuat *cluster* pelatihan sesuai kemampuan masing-masing lembaga penerbitan jurnal,” ungkap.

Menurutnya, beberapa daerah yang siap *e-journal* tersebar di beberapa pulau. Yang pertama, di pulau Jawa, menyusul kedua Pulau Sumatera lalu Kalimantan. Program ini dilaksanakan secara gratis. Bahkan Kemenristekdikti akan membantu daerah-daerah yang tertinggal seperti server dan pelatihan.

Bagi Suwitno, sistem online ini mengatur sebagai syarat utama akreditasi. “Kalau mereka mau mencetak sebagai publikasi pribadi silahkan saja, tetapi untuk syarat akreditasi kami hanya menerima via *online*,” imbuhnya.

Kehadiran *e-journal* akan jauh menguntungkan. Pasalnya, dengan *e-journal* akan memudahkan para pembaca untuk mengakses jurnal-jurnal yang telah diterbitkan di manapun dan kapan pun. Selain itu, kehadiran *e-journal* memudahkan penilaian secara transparan. “Kehadiran akreditasi jurnal secara *online* membuat proses akreditasi tidak bisa direkayasa oleh para pengelola jurnal. Semua bisa terlacak secara mudah, efisien, dan transparan,” katanya.

Sistem Satu Pintu

LIPI dan Kemenristekdikti saat ini menyiapkan sebuah sistem akreditasi berbasis satu pintu, atau yang biasa dikenal Akreditasi Jurnal Nasional (ARJUNA). Sistem inilah yang nantinya akan diberlakukan pada April 2016. Arjuna tersebut berada di bawah pengawasan langsung Kemenristekdikti dan LIPI.

Menurut Wahid tidak akan terjadi tumpang tindih antara LIPI dan Dikti seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Justru Arjuna merupakan sistem penyeragaman

aturan penilaian dari ke dua lembaga. Nantinya, penilaian akan dibagi menjadi dua kategori. LIPI menilai jurnal ilmiah yang berasal dari Kementerian atau Lembaga yang bukan di bawah Kemenristekdikti. Sedangkan Kemenristekdikti melakukan penilaian terhadap lembaga yang berkoordinasi dengan perguruan tinggi.

“Dalam sistem tersebut ada pilihan dari masing-masing lembaga. Akan ditunjukkan kepada siapa? LIPI kah? Atau Kemenristekdikti? Sesuai dengan lembaga naungan masing-masing. Tentunya hal tersebut memiliki kajian yang berbeda bukan? Artinya, Arjuna memiliki satu kepala dengan kewenangan berbeda. Kita bekerja sama dan sudah sepakat peraturannya sama,” kata Wahid

Para pengelola jurnal di Indonesia pun wajib melakukan proses akreditasi melalui sistem tersebut. Menurut Wahid, ketika Arjuna sudah berlaku, maka LIPI maupun Kemenristekdikti sudah tidak lagi menerima proses akreditasi melalui cetak. “Jika dulu para pengelola jurnal kan melakukan akreditasi harus membawa berkas yang banyak, pada waktu yang akan datang itu tidak diperlukan lagi. Secara sistem akan diketahui kapan artikel tersebut dibuat, kapan melalui proses *review*, dan sebagainya,” ujar Wahid.

Antara LIPI dan Kemenristekdikti saat ini tengah melakukan persiapan pengembangan sistem, sesuai dengan aturan penilaian yang ada. Sistem akreditasi satu pintu melalui ARJUNA tersebut saat ini bisa diakses melalui www.arjuna.dikti.go.id. Nantinya setiap lembaga penerbitan jurnal memiliki akun ID dan Password masing-masing untuk mengunggah berkasnya yang akan dinilai. **(IFR/MSR)**



Evaluasi Kinerja Kemendagri 2015



AKTIVITAS



BPP Kemendagri Terus Tingkatkan Kualitas Jurnal Bina Praja

Awal 2016, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengajak seluruh pejabat Eselon I s.d IV untuk rapat pengarahan T.A 2016 dan evaluasi kinerja 2015. Dalam pertemuan itu, Tjahjo banyak memaparkan apa saja yang masih menjadi pekerjaan rumah pada 2016, salah satu yang harus dibenahi adalah masalah pengelolaan sampah, tata kota, masalah pangan, alat pemadam kebakaran, dan segudang evaluasi serta target pada awaktu yang akan datang. “Tentunya kita terus berbenah diri masalah pengelolaan sampah, tahun ini kita akan undang 15 kepala daerah untuk membahas lebih lanjut pengelolaan dan penataan sampah,” kata Tjahjo dalam rapat tersebut, Senin (4/1) di Kementerian Dalam Negeri.

Tjahjo juga menyoroti masalah tata kota, seperti tersedia tempat-tempat umum yang layak, dan juga pemimpin daerah seperti Bupati, Camat, atau Lurah. Menurutnya, 58 persen Camat di Indonesia tidak menguasai administrasi pemerintahan. “Ke depannya, sebelum resmi dilantik, paling tidak seminggu sebelumnya kita latih mereka, kalau perlu isteri pejabat juga ikut dilatih untuk menjadi pelayan masyarakat,” katanya.

Selain itu, masalah stabilisasi harga pangan ini juga menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri. Sebab permasalahan pangan menyumbang 30 persen inflasi. Seperti Beras, Minyak Goreng, Jagung, Daging, dan Cabai.

Menurut Tjahjo, masalah pangan di Indonesia terjadi karena keterlambatan panen sehingga menghambat sistem perekonomian bangsa. Bahkan kebutuhan daging di Indonesia masih harus impor dari berbagai negara. “Konsumsi daging di Jakarta saja mencapai 25 ton/hari,” tambahnya.

Selain itu, mengingat banyaknya permasalahan dalam negeri, Menteri Dalam Negeri mengatakan ada empat poin kesimpulan catatan pada 2015. Yang pertama adalah isu revolusi mental Nawacita yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Kedua, isu pelayanan publik yang menjadi jembatan masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan publik. “Pelayan publik (Pegawai Negeri Sipil) harus membuang budaya priyai, dan melayani masyarakat, bukannya minta dilayani,” ungkapnya.

Ketiga, masalah yang juga krusial adalah masalah penyerapan anggaran. Pasalnya penyerapan anggaran selama 2015 cukup bagus, baik itu di pusat maupun di daerah. Hal itu diamini oleh Sekertaris Jenderal, Yuswandi A. Temenggung. Ditemui di tempat yang sama, ia juga mengungkapkan, posisi realisasi anggaran 2015 adalah 61,30 persen, lebih baik dari tahun sebelumnya. “Pergerakan ini tentu akan terus kami monitor, sehingga laporannya akan final dan tidak ada pergerakan lagi,” kata Yuswandi.

Isu penyerapan ini juga diharapkan oleh Tjahjo pada 2016 nanti agar lebih efektif dan efisien. “Penyerapan

anggaran harus lebih dioptimalkan dengan tetap memerhatikan kualitas, sasaran, dan strategi pembangunan yang hendak dicapai dengan menerapkan program nyata yang hasilnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” harap Tjahjo.

Terakhir, Tjahjo mengingatkan soal isu pilkada serentak, Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) menjadi skala prioritas perhatian dalam catatan Kabinet Kerja 2015. Perhatian utama Kabinet Kerja juga menempatkan teks amnesti, Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Aceh, narkoba, PPAK dan radikalisme terorisme sebagai poin penting yang disoroti.

Kemendagri mencatat, selama 2015 Bidang Polhukam telah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga – lembaga dan negara sahabat, seperti membangun koordinasi dengan negara Australia, PPAK, BPK dan *cyber security*. Polhukam juga melakukan pencermatan terhadap aset dan tindak pidana pencucian uang, membentuk pokja kebenaran dan pelanggaran HAM berat, serta persiapan revisi UU Pilkada, Pilpres, serta masalah kebakaran hutan lahan gambut. “Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua, tugas berat masih menanti pada 2016 ini. Segala bentuk masalah, segera dikomunikasikan pada saya, jangan takut. Yang terpenting adalah komunikasi,” tutup Tjahjo. **(IFR)**

Pada 7 Januari lalu, BPP Kemendagri mendatangi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk menyerahkan berkas reakreditasi jurnal. Sebelumnya, satu-satunya jurnal terpercaya dari BPP Kementerian Dalam Negeri itu memang sudah terakreditasi LIPI berdasarkan dengan No SK Akreditasi 531/AU1/P2MI-LIPI/04/2013.

Kepala Sub Bagian Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi BPP Kemendagri, Moh. Ilham A. Hamudy mengatakan, pentingnya akreditasi jurnal sama halnya dengan kualitas penulisan jurnal. “Akreditasi sangat diperlukan untuk menunjang kepercayaan dan kredibilitas suatu jurnal,” ungkapnya.

Begitu banyak artikel penelitian yang masuk untuk Jurnal Bina Praja. “Meski banyak yang bergabung mengirimkan artikel, semua artikel yang masuk, terus kami seleksi dengan standar yang ketat,” katanya.

Sementara itu per April 2016, peraturan pemerintah mewajibkan semua jurnal beralih ke jurnal elektronik atau *e-journal*. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapusbindiklat peneliti LIPI, Husein Avicenna Akil, saat ditemui Tim Reakreditasi Jurnal BPP Kemendagri di Pusbindiklat LIPI Cibinong, Bogor, Jawa Barat

Ia mengatakan, keberadaan jurnal elektronik akan lebih memudahkan para peneliti dalam mengakses jurnal, karena dapat diakses secara *online* lebih efisien dan efektif.

Di tempat yang sama, Mukhammad Nurul Furqon, Kepala Subbidang Akreditasi mengatakan, banyak kendala ketika jurnal ilmiah akan memiliki sekaligus bermigrasi ke jurnal elektronik. Selain membutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit, juga membutuhkan tenaga khusus di bidang *IT* agar *e-journal* tersebut dapat dikelola secara baik.

“Masalah *maintenance*, pengelolaan, evaluasi, instalasi, serta manajemen penerbitan elektronik jurnal harus tertata dengan baik. Maka dari itu, penting kiranya diadakan pelatihan oleh pakar yang benar-benar mengerti tentang *e-journal* terlebih dahulu,” jelasnya. **(IFR)**



Gedung baru BPP Kemendagri (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri) yang terletak berada di belakang gedung lama BPP, rencananya akan siap huni pada Juli 2016 mendatang. Gedung yang berisikan lima lantai itu nantinya akan dihuni oleh empat pusat litbang BPP.

Kepala Bagian Umum BPP Kemendagri Jonggi Tambunan mengatakan, lantai satu akan digunakan untuk perpustakaan, lantai 2 sampai 5 digunakan untuk empat pusat yang ada di BPP ini. “Empat pusat itu terdiri dari Pusat Litbang, Otda, Politik, dan Pemerintahan Umum, Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan, Pusat Litbang Inovasi Daerah, dan Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah,” katanya.

Namun rencana gedung yang siap huni pada Juli 2016 itu masih ada beberapa catatan. Terutama masalah dana APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) yang diprediksi akan turun pada Februari 2016. Menurutnya tahap penyelesaian gedung tersebut saat ini sudah mencapai 90 persen, tinggal menunggu tahap akhir 10 persen lagi untuk pengadaan properti. Pengadaan tersebut nantinya akan melalui proses lelang kepada kontraktor, selanjutnya akan dilakukan pengawasan teknis dari pihak Bagian Umum BPP Kemendagri. “Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan properti gedung baru mencapai Rp 6 miliar. Tetapi, dana yang turun hanya sekira Rp 1,6 miliar” kata Jonggi.

Pengadaan gedung tersebut membutuhkan dana tambahan sekira Rp 5 miliar. Saat ini pihaknya telah mengupayakan agar gedung tersebut bisa ditempati secepatnya dan bisa diresmikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, paling lambat Juli mendatang. **(IFR)**



**Gedung Baru
BPP Kemendagri
Siap Huni
Juli 2016**



Rapat Anggaran 2016 BPP Kemendagri

Pada awal 2016, BPP Kemendagri (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri) menggelar Rapat Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2016. Rapat yang di selenggarakan di Aula BPP Kemendagri dipimpin oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri, Domoe Abdie.

Pembahasan utamanya adalah soal penyerahan DIPA 2016, POK T.A 2016, dan SK, PPK, PPTK, PPSPM, dan BP. Domoe mengatakan, DIPA dan POK yang diserahkan sebetulnya sudah dirancang sejak beberapa bulan yang lalu tepatnya pada Juni 2015 melalui proses panjang RKA-KL. Kendati demikian, saat ini DIPA dan POK tersebut sangat dimungkinkan untuk direvisi, mengingat kondisi sekarang tentu berbeda dengan DIPA dan POK tersebut yang dirancang pada tahun lalu.

Lebih lanjut ia menekankan beberapa hal penting yang harus segera dilakukan. Dalam proses revisi, misalnya, sebaiknya dilakukan pembedahan terlebih dahulu terhadap POK yang ada. “Mengingatkan perlunya untuk segera mungkin dibuat jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga revisi bisa dilakukan pada akhir Januari ini,” ungkapnya

Selain itu, ia juga meminta kepada seluruh pejabat struktural untuk selalu melakukan konsolidasi yang baik agar program kegiatan T.A 2016 dan berbagai kendala yang akan muncul pada pelaksanaan program dan kegiatan dapat diantisipasi dan diminimalisasi.

“Hubungan kerja antarpusat atau bagian harus terus diintensifkan serta harus selalu dijalin komunikasi yang baik dan harmonis agar suasana kerja menjadi kondusif,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, pembahasan mengenai Honorarium tenaga kontrak (*outsourcing*) juga mendapat perhatian. Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri, Mohammad Noval, menekankan perlunya mengevaluasi keberadaan tenaga *outsourcing*. Menurutnya saat ini BPP berencana menyatu-tangani tenaga *outsourcing* dengan menempatkan di bawah kendali sekretariat yang dialokasikan di Bagian PJKSE. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan berjalan lebih tertib.

Selain tenaga *outsourcing*, Mohammad Noval juga meminta untuk memerhatikan honorarium tim kegiatan atau tim fasilitasi pengendali mutu, ia mempertanyakan apakah nantinya mereka masih bisa dibuat tim dalam tugas regular atau tidak. “Masing-masing Puslitbang itu melaksanakan apa, itu harus jelas, termasuk berapa dana untuk penelitian, berapa dana untuk pengembangan, dan jangan lupa rumuskan topik-topik dan judul penelitian apa saja yang akan dilaksanakan tahun ini.” tegas Noval.

Hal itu sesuai dengan PMK No 65 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan 2016, Permen PAN No 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, demi meningkatkan efisiensi dan aktivitas kerja aparatur. **(IFR)**



Tingkatkan Kualitas Kerja dengan SIKERJA

Demi mencapai kualitas kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Biro Kepegawaian Kemendagri menginisiasi penerapan sistem aplikasi SIKERJA (Sistem Penilaian Kinerja).

Dalam sosialisasi SIKERJA pada (13/1) lalu di Aula BPP Kemendagri, Kepala Bagian Pengembangan Karier Biro Kepegawaian Kemendagri mengatakan, nantinya setiap pegawai tidak terkecuali BPP akan dibekali aplikasi cerdas berbasis internet SIKERJA. Secara teknis cara kerjanya adalah dengan memasukkan laporan kerja. "Ketika seorang staf masuk kedalam sebuah sistem aplikasi SIKERJA, ia akan dibekali *password* untuk *login* ke dalam aplikasi tersebut. Setelah itu, ia harus menginput hasil pekerjaannya sampai menunggu proses persetujuan atasan masing-masing. Secara otomatis menit kerja, persentase kerja, serta tunjangan kinerja akan langsung terlihat di sistem aplikasi tersebut," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, aplikasi SIKERJA ini merupakan cara satu-satunya melihat kinerja

tiap orang secara *real time* berdasarkan penilaian 50 persen kedisiplinan, dan 50 persen kinerja. "Jika Anda bekerja lebih, maka Negara akan membayar lebih. *Nah*, jika selama ini penilaian berdasarkan *finger print* saja, sekarang juga harus dilihat dari kinerja dia selama 8 jam," katanya.

Sistem penilaian ini mengukur tunjangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau remunerasinya. Jika kedisiplinan bagus namun kinerja jelek, maka remunerasi pegawai itu akan berkurang berdasarkan penilaian atasan masing-masing.

Dengan konsep "*Equal Work Deserves Equal Pay*," SIKERJA hadir dalam rangka mekanisme pembayaran tunjangan (remunerasi) yang lebih obyektif melalui penilaian kinerja individu berdasarkan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja. Menurut Cheka, aplikasi tersebut sudah bisa digunakan sejak 4 Januari 2016, dan akan diujicobakan dalam enam bulan ke depan. Selain itu, SIKERJA juga sudah bisa diakses melalui *smartphone* berbasis *android*, *ipad*, tablet, laptop, atau komputer. **(IFR)**

SISTEM
JABA
KEMENTE



PENILAIAN KINERJA PADA APARATUR DAERAH DALAM NEGERI (e-SIKERJA)

SIKERJA+
 Sistem Penilaian Kinerja Jukdisik Aparatur

www.kemendagri.go.id

KEGIATAN ORIENTASI DAN TUGAS APARATUR BPP KEMENDAGRI

Mengikis *Mental Block* Menuju Perubahan Mental Aparatur



Saat fajar mulai meninggi, Kamis (18/2) pagi, para staf dan pegawai sudah sibuk menyiapkan diri untuk bergegas pergi. Hari itu akan dilaksanakan kegiatan orientasi dan tugas fungsi aparatur yang berada di lingkup BPP Kemendagri. Memanfaatkan ketenangan kawasan Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, kebersamaan diharapkan tumbuh semakin erat. Acara juga bertujuan untuk menambah wawasan kelitbangan dalam rangka upaya menuju perubahan mental.

Antusiasme tidak terbendung kala bus yang membawa rombongan peserta berhenti pada parkir utama Taman Matahari, Puncak, Cisarua, Bogor, sekira pukul 11.00 WIB. Dengan raut ceria seluruh peserta berjalan kaki memasuki area permainan yang sudah dipersiapkan. Hari itu panitia pelaksana beruntung, suasana pagi cukup cerah di tengah kondisi beberapa wilayah Indonesia yang telah memasuki musim hujan, terlebih Bogor yang terkenal sebagai kota hujan (*rain city*).

Langit biru jernih dengan awan putih berarak memasuki kawasan Puncak. Plt. Kepala BPP Kemendagri, Domoe Abdie bersama para Kepala Pusat dan Kepala Bagian BPP seirama bersama seluruh peserta dan turut ambil bagian dari beberapa jenis perlombaan yang menjadi rangkaian acara pada kegiatan tersebut. Mereka tidak sungkan berjibaku di lapangan serta terjun langsung ke sungai untuk sekadar berarung jeram.



Sebagai panitia pelaksana, Yuddy Kuswanto, Kepala Sub Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional yang menggagas konsep acara, juga turut serta. Berpatokan pada konsep acara yang berkesan dan tidak menjenuhkan, dari setiap

pertama sebagai penghilang ketegangan peserta. Menurut salah satu mentor dan instruktur *outbound*, Bayu (36) *ice breaking* selain melatih fokus juga untuk menstimulus antusiasme peserta agar para peserta siap mengikuti

menyadarkan betapa pentingnya setiap bagian dalam sebuah organisasi.

Permainan yang paling ditunggu oleh peserta adalah *paint ball*, permainan yang diambil dari konsep perang ini mengutamakan strategi,



permainan dan serangkaian acara lainnya, ia berharap dapat membawa dampak positif dan tercipta sebuah sinergitas kinerja di BPP. "Dengan acara ini, diharapkan tercipta sebuah lingkungan kerja yang harmoni, bagaimana pimpinan dan bawahan selaras memiliki visi dan misi yang sama, dengan kata lain pada akhirnya akan tercipta *output* yang baik," kata Yuddy.

Pada kegiatan kali ini, Yuddy juga berinisiatif untuk menambahkan beberapa *game* yang berbeda dengan tahun lalu. Selain itu, konsep sekaligus jadwal pelaksanaan juga dirombak total, permainan pun lebih variatif dan sarat makna. Perbedaan terlihat semenjak peserta menginjakkan kaki di lokasi. Para peserta tidak dimanjakan dengan beristirahat di hotel terlebih dahulu, tetapi mereka langsung dibawa menuju lokasi dilaksanakannya *outbound* dan *games*.

Adalah *ice breaking* permainan

permainan selanjutnya. "Kita bisa lihat tingkat kefokuskan peserta dari siapa yang mendapat *punishment*," ujarnya.

Selain *ice breaking*, ada juga *game* yang dilakukan secara berkelompok di antaranya *fun games* yang bertujuan untuk membuka *personal block* dan dapat menggairahkan suasana peserta. Ada pula *team building games* yang berfungsi melatih kemampuan personal dalam bekerja sama dengan orang lain. Ada juga *effective communication games* untuk meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif yang meliputi kemampuan mendengarkan dan memahami pendapat orang lain, serta pengekplorasi gagasan, *problem solving games* adalah permainan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Serta *synergy games* yaitu jenis permainan yang digunakan untuk

kecerdasan, ketangkasan, dan keteguhan pemimpin. Pemimpinlah yang akan menjadikan sebuah tim menang atau kalah. Sebagaimana perang sesungguhnya yang memunyai lawan, *paint ball* ini juga menjadikan tim lain sebagai lawan. Siapa yang mendapatkan bendera, dialah yang akan menjadi pemenang.

Selain itu, perahu karet yang melaju bersama derasnya arus sungai yang berderai-derai (*rafting*) juga menjadi permainan favorit peserta *outbound*, permainan arung jeram (*rafting*) bermakna membangun kekuatan, keyakinan dan keuletihan tim dalam menghadapi tantangan dan persaingan serta bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam tim.

Motivasi *getting vision*

Kegiatan orientasi dan tugas fungsi aparatur tersebut juga diisi dengan acara *getting vision* BPP



Kemendagri yang bertempat di Ballroom Hotel New Ayuda Puncak, Cisarua, Bogor, yang dilaksanakan pada malam hari setelah *check in* hotel dan makan malam.

Getting vision merupakan acara motivasi yang disampaikan oleh motivator Hamry Gusman Zakaria, yang juga penulis buku *best seller* "5 Pilar Revolusi Mental." Hamry memberikan tips tentang cara mendobrak *mental block* dalam rangka membentuk pribadi yang sukses di berbagai bidang baik dari segi karir, agama, dan finansial.

Hamry juga menceritakan bagaimana dirinya bisa berhasil mengatasi *mental block* setelah beberapa kali mengalami kebangkrutan. Motivasi diawali dengan pemaparan sejarah *mental block* yang kerap melekat pada setiap individu bangsa Indonesia sejak masa Kolonial

Belanda. "Penjajahan selama 3,5 abad yang lalu membuat bangsa hanya bisa *nrimo* semua yang dikatakan oleh pemerintah Kolonial. Selain itu pada awal kemerdekaan *mental block* masih juga melekat pada para pejabat, tidak jarang banyak pejabat kala itu yang memiliki *mental holland danken* (penjajah), apa yang harus mereka dapat dari rakyat," ujar Hamry.

Motivasi Hamry diharapkan bisa menghilangkan penyakit mental di kalangan birokrat, seperti individualisme, egoisme, sinisme, borjuisme, dan sering menonjolkan kepentingan golongan atau partai. Menurut Hamry, keberhasilan sebuah lembaga tergantung dari seorang pemimpin, pemimpin harus mau mendengar suara bawahannya, pemimpin juga harus profesional dan religius, selain itu pemimpin juga harus selalu fokus pada solusi, bukan pada masalah, pemimpin juga harus berjiwa konseptor dan eksekutor, serta revolusioner.

Di akhir acara motivasi, diputar video dalam rangka menggugah nasionalisme para peserta yang diinisiasi oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri. Salah satunya adalah video klip yang berjudul

Indonesia Pusaka, yang dinyanyikan oleh para tokoh nasional.

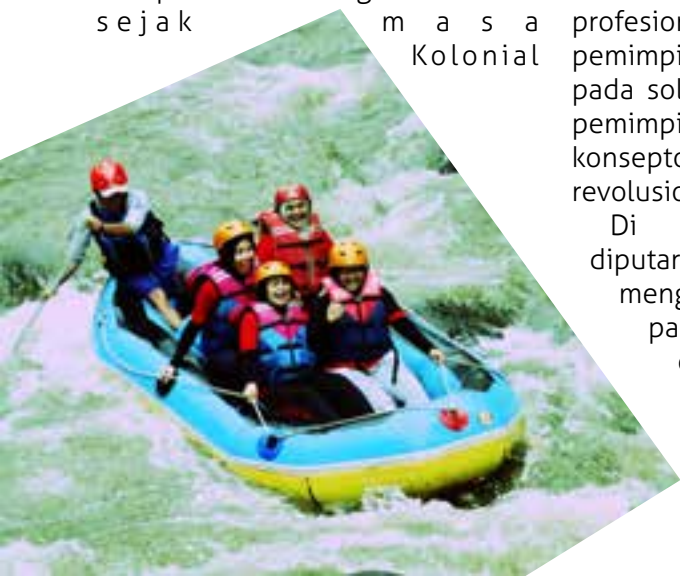
Rangkaian acara ditutup dengan hiburan *live music* dari para peserta dan juga para penyanyi lokal. Acara tersebut sekaligus menambah keceriaan para peserta.



Tidak sedikit peserta menunjukkan potensi seninya dengan menyanyi di hadapan para peserta lainnya.

Menuju perubahan mental

Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Sisdur Serta Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara, Teguh Narutomo, merasa puas atas terselenggaranya acara tersebut. Menurutnya serangkaian acara Kegiatan Orientasi Tugas dan Fungsi





Aparatur
B P P

Kemendagri tersebut, bertujuan untuk menambah wawasan tentang kegiatan kelitbangan dan dalam rangka upaya menuju perubahan mental aparatur.

Teguh juga menambahkan kegiatan merupakan salah satu bentuk orientasi tugas fungsi. Kegiatan ini dalam rangka menyamakan persepsi yang kemudian bisa mengikis *mental block* yang dimiliki setiap individu khususnya yang ada di lingkup BPP Kemendagri. Selain itu kegiatan juga bertujuan sebagai wadah untuk menyatukan rasa kebersamaan. "Pada dasarnya untuk menyatukan rasa kebersamaan agar setiap peserta bisa bekerja sama dalam

diputarkan

pada sesi motivasi, i am menjelaskan maksud Plt. Kepala BPP yang memutar video tersebut. Menurutnya, video bermakna pekerjaan yang kita lakukan bukan semata-mata untuk bangsa. Tetapi juga untuk pribadi agar kita bisa terarah menuju kehidupan yang lebih baik. "Diharapkan ada dampak positif dari kegiatan tersebut terhadap apa yang selama ini kita perjuangkan untuk kebaikan bersama." Teguh juga mengatakan, acara akan rutin dilaksanakan setiap tahun, "Pada masa mendatang diharapkan kegiatan mengusung konsep yang lebih baik," ujar Teguh

Jumat (19/2), merupakan hari kedua pelaksanaan acara,

Waktu

menunjukkan pukul 09.00 WIB, terlihat jelas keindahan barisan bukit dari kejauhan ketika awan pekat penutup mentari tersibak oleh angin. Hal tersebut sebagai penanda waktunya para peserta untuk bergegas pulang.

Kegiatan membawa kesan tersendiri bagi beberapa peserta yang mengikuti acara. Niyan (22) menuturkan bagaimana acara begitu berkesan, dengan wajah ceria ia mengatakan, acara yang diadakan memang sangat mengasyikan, dengan perasaan menyesal ia berharap waktu acara dapat dilaksanakan lebih lama lagi. "Kalau bisa acara ditambah jadi 3 hari 2 malam, agar kebersamaan



segala hal, terutama pada setiap pekerjaan yang diharapkan bisa mencapai visi dari BPP Kemendagri yang lebih mantap," ujarnya.

Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memberi dampak berupa percepatan kinerja. Setiap permainan menurut Teguh memunyai makna sinergitas antara pemimpin dan yang dipimpin, konsep acara pun dikemas secara komprehensif.

Selain itu Teguh juga memberikan komentar mengenai video yang

senandung musik dangdut pengiring senam menyatu bersama dinginnya udara pagi kawasan Puncak yang menelusuk ke pori-pori kulit, senam pagi menjadi pengawal aktivitas hari itu.

Dua orang instruktur senam melenggak-lenggok di hadapan puluhan peserta yang memenuhi pelataran Hotel New Ayuda. Koreografi yang asyik membuat para peserta semakin semangat mengikuti acara hingga akhir.

lebih terasa lagi." kata Niyan.

Begitu juga dengan Hazel (27) dan Aris (21), mereka merasa puas dan berharap acara tahun depan bisa dilaksanakan di luar kota yang lebih jauh dari Jakarta, "Kalau bisa tahun depan di luar kota saja, tidak harus selalu Puncak atau Anyer, kan lebih bagus," ujar mereka. **(MSR)**



HATI-HATI !!

Korupsi menggerogoti
Kekayaan negeri

Cegah dari saat ini
Mulai dari diri sendiri!





Oleh:
Alexander Yanuard Dalla
Peneliti BPP Kemendagri

Kisah 1 Muharam di Desa Pelauw

Konflik sosial antara dua kelompok masyarakat di Desa Pelauw Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Konflik tersebut adalah konflik antara dua kelompok penganut hisab (penentuan 1 Muharam untuk merayakan hari besar Islam) yang berbeda, kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan pada tanggal penentuan hisab di mana hisab pertama sebagai kelompok muka (Salampesy Muka) menentukan 1 Muharam jatuh lebih awal dari kelompok belakang (Salampesy Belakang) yang penentuan hisabnya bisa memakan waktu tiga sampai empat hari kemudian.

Konflik ini telah berlangsung sejak 1981 akibat dari perbedaan sudut pandang dalam menetapkan tahun baru Islam. Kelompok masyarakat Salampesy Belakang menghendaki penentuan harus berdasarkan tradisi leluhur yang mereka anut. Menurut mereka proses penentuan harus melalui tiga suku adat masyarakat yang dipertemukan dalam satu rumah adat dan masing-masing suku mewakili utu-

sannya, melalui proses yang sakral, 1 Muharam diumumkan langsung kepada masyarakat secara langsung setelah perundingan secara tertutup selesai.

Sementara menurut kelompok masyarakat Salampesy Muka, penentuan tahun baru Islam itu hendaknya disesuaikan dengan aturan pemerintah yakni berpedoman pada keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Konflik bermula pada masa transisi pemerintahan desa yang dipimpin Raja Abd. Basir Latuconsina meninggal

berubah dan sangat bertolak belakang dengan kebijakan ayahnya. Ia mengubah pola pandang masyarakat tentang Penetapan 1 Muharam tersebut dengan berpedoman pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pro dan kontra masyarakat terhadap keputusan tersebut mengakibatkan masalah semakin meluas dengan dan beberapa intimidasi terhadap masyarakat yang tidak setuju, misalnya, masyarakat yang bekerja di pelabuhan kapal dikeluarkan dari pekerjaannya, bahkan guru sekolah yang tidak setuju pun diberhentikan dari pekerjaannya.

Puncaknya, pada 2012, berawal saat Kepala Desa Pelauw berinisiatif memperbaiki rumah adat, ia mendapat protes dari kelompok masyarakat Salampesy Belakang pada saat penentuan tanggal peresmiannya. Konflik membesar hingga menyebabkan 6 orang meninggal, 8 orang luka-luka dan 307 rumah terbakar akibatnya sekitar 423 kepala kelu-

arga kehilangan tempat tinggal dan kelompok Salampesy Belakang diungsikan ke Desa Rohomoni dan kota Ambon.

Dalam perjalanannya, tepat pada Februari 2016 pengungsi tersebut telah berdiam di Desa Rohomoni selama 4

“Berbagai upaya telah ditempuh oleh pengungsi masyarakat Salampesy Belakang dengan membentuk rekonsiliasi pemulangan pengungsi Desa Pelauw. Beberapa kali mereka melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Polhukam, Menko PMK, Kemendagri, namun masih belum menemukan titik terang.”

dan harus menyerahkan tahta kekuasaan kepada anaknya Efendy Latuconsinha yang sekaligus didaulat menjadi Kepala Desa Pelauw.

Kebijakan penentuan hisab sebagai tradisi yang terus dipertahankan secara turun temurun akhirnya harus

tahun. Populasi mereka pun semakin bertambah. Keberadaan mereka mulai membuat gerah masyarakat Desa Rohomoni, selain dianggap mengambil sebagian lahan masyarakat, perilaku anak-anak muda Salampesy Belakang tidak disukai warga Desa Rohomoni hanya karena perbedaan tradisi.

Konflik tersebut apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan permasalahan baru. Yang terjadi bukan lagi konflik antara masyarakat Salampesy Belakang dengan Masyarakat Salampesy Muka tetapi justru dengan kelompok masyarakat di Desa Rohomoni.

Menindaklanjuti hasil pertemuan rapat pertama, Plt. Dirjen Kesbangpol Indra Baskoro dan Direktur Ormas, Agama dan Aliran Kepercayaan Budi Prasetyo mengadakan rapat kedua yang kali ini melibatkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku, Badan Kesbangpol Kabupaten Maluku Tengah, dengan Dirjen Kesbangpol. Agenda rapat tersebut antara lain mendengarkan paparan dari Badan Kesbangpol Provinsi Maluku dan Badan Kesbangpol Kabupaten Maluku Tengah.

Kesimpulan rapat tersebut berdasar pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang meny-

yarat dari kedua belah pihak dengan membentuk sebuah forum.

Namun ironis, ketika semua upaya sudah dilakukan, harapan pengungsi untuk kembali ke tanah kelahiran mereka pun harus terkubur, mereka masih saja mendapat penolakan bahkan tidak diterima oleh kelompok masyarakat Salampesy Muka, dan hingga saat ini pemerintah juga masih terus mencari solusi dan jalan terbaik dari permasalahan ini.

Solusi pun muncul dari berbagai kalangan, seperti pandangan yang dikemukakan oleh mantan Kasubdit Penanganan Konflik Sosial yang sekarang menjadi Kabid Administrasi Kewilayahan di BPP Kemendagri Yohanes Sena, ia mengatakan konflik tersebut bisa saja dikatakan sebagai konflik yang tidak berujung. “Konflik tersebut tak berujung karena pemerintah daerah masih mencari pola penyelesaian yang hingga saat ini belum ditemukan. Sedangkan pemerintah pusat pun tidak dapat mengambil tindakan akibat kewenangan yang dibatasi oleh undang-undang,” kata Yohanes

Yohanes Sena menawarkan solusi, seharusnya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyerah saja. “Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah seharusnya tegas, mereka sebaiknya katakan saja tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, sehingga dengan begitu Pemerintah Provinsi Maluku akan mengambil alih penyelesaian konflik, dan apabila pemerintah provinsi juga tidak mampu, maka serahkan saja kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.

Yohanes juga berpendapat agar konflik ini harus segera diselesaikan dengan menghadirkan Tim Pusat yang dikoordinasikan oleh Kemenpolhukam seperti yang diamanatkan dalam UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dengan menghadirkan unsur terkait seperti Kemendagri, TNI/Polri, Kementerian Sosial, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat.

“UU tersebut menginstruksikan Penanganan Konflik pada pascakonflik, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi,” ujar Yohanes.



Yohannes Sena
Mantan Kasubdit Penanganan Konflik Sosial

Berbagai upaya telah ditempuh oleh pengungsi masyarakat Salampesy Belakang dengan membentuk rekonsiliasi pemulangan pengungsi Desa Pelauw. Beberapa kali mereka melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Polhukam, Menko PMK, Kemendagri, namun masih belum menemukan titik terang. Keinginan Tim Pengungsi untuk beraudiensi pun terwujud pada 2015 ketika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan agar penyelesaian konflik harus difasilitasi yang kemudian direalisasikan pada rapat pertama yang diinisiasi oleh Plt. Dirjen Kesbangpol Indra Baskoro, Dirjen Ormas Agama dan Aliran Kepercayaan Budi Prasetyo, Kepala Biro Hukum Sigit Pudjianto serta perwakilan dari Dirjen Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Rapat yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri tersebut memberikan kesempatan kepada Tim Pengungsi untuk memaparkan rencana dan tujuannya.

tidak ada pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah. Penyelesaian konflik dua kelompok masyarakat yang diminta untuk diselesaikan oleh pemerintah pusat dibatasi oleh aturan yang ada, sehingga harus dikembalikan ke pemerintah daerah.

Upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah antara lain memperketat keamanan dengan melibatkan TNI dan Polri, melibatkan MUI lokal maupun Pusat dengan mengadakan sosialisasi kepada kedua kelompok untuk rekonsiliasi. Selain itu, ada pula beberapa bantuan seperti dari Kementerian Sosial sebesar Rp 10 juta untuk masing-masing kepala keluarga, dari pemerintah provinsi sebesar Rp 3 juta/KK, dan dari Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp 10 juta untuk kepala keluarga yang kehilangan rumah, dan terakhir adalah pembangunan 402 rumah. Upaya untuk menyatukan kembali kedua kelompok masyarakat ini pun dilakukan melalui pendekatan kepada tokoh-tokoh mas-

SWASEMBADA PANGAN DI MERAUKE

Sejak era Orde Baru, masyarakat berdiam di wilayah-wilayah sempit lahan pertanian untuk itu pemerintah melakukan transmigrasi terutama di Pulau Jawa sebagai bentuk pemerataan penduduk dan pengelolaan lahan pertanian. Salah satunya Kabupaten Merauke yang menerima program transmigrasi tersebut.

Kondisi geografis Kab. Merauke merupakan dataran serta bervegetasi gambut/rawa. Sehingga memudahkan para transmigran membuka lahan persawahan. Pada era kepemimpinan bupati Jhon Gluba Gebze, Kabupaten Merauke dikenal sebagai daerah di provinsi Papua yang berhasil melakukan swasembada beras.

Program swasembada tersebut dikenal dengan program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Program tersebut diawali oleh usulan Kab. Merauke pada 2007 yang kemudian dikembangkan pada 2008 dan diresmikan pada 2010. Awal mula program tersebut, ditargetkan dengan lahan seluas 1,9 juta Ha.

MIFEE sendiri adalah program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang dikembangkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lewat program ini, pemerintah berharap bisa menjamin ketahanan pangan dan energi Indonesia. Sebelumnya MIFEE bernama Merauke Integrated Rice Estate (MIRE). Lalu MIRE kemudian berubah menjadi MIFEE (*the Merauke Integrated Food and Energy Estate*) pada tahun 2008.

MIFEE ini direncanakan akan melibatkan 36 investor yang akan berinvestasi. Pada 2010 dilakukan seremonial *pilot project* Medco di Serapu. Melalui UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan direncanakan ada 1,23 juta ha yang akan dikembangkan. Dari luas ini direncanakan 50 persen diperuntukan untuk tanaman pangan, 30 persen untuk tebu, dan 20 persen untuk sawit. Dari MIFEE ini diharapkan diproduksi 1,95 juta ton beras, 2,02 juta ton jagung, 167 ribu ton kedelai, 64 ribu sapi, 2,5 juta ton gula, 937 ribu ton minyak sawit per tahun.

Kepala Bulog Divre Papua dan Papua Barat, Arief Mandu mengatakan produksi beras Merauke per tahunnya mencapai 30-35 ribu ton. Sementara kebutuhan untuk masyarakat Merauke berkisar 25 ribu ton. Sehingga masih ada surplus beras lokal 10 ribu ton.

“Selama ini sejumlah kabupaten di sekitar Merauke di antaranya Kabupaten Mappi, Boven Digul, Asmat dan juga beberapa di Provinsi Papua Barat di antaranya Sorong sudah mengkonsumsi beras lokal Merauke. Pengiriman ke Jayapura dan beberapa kabupaten lainnya adalah kali pertama dan ini sebagai salah satu bentuk swasembada pangan di Papua. Apalagi Merauke telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai lumbung pangan nasional,” jelas Arief kepada Gatra.com

MIFEE masih dilanjutkan pada era Jokowi. Pemerintahan merencanakan membuka lahan sekurangnya 1 juta ha untuk pengembangan estate padi. Dengan adanya estate ini

pemerintah menargetkan terjadi peningkatan produksi beras nasional. Tak hanya swasembada yang dimimpikan bahkan akan melakukan ekspor beras.

Beberapa sejumlah fasilitas juga diberikan untuk mendukung program tersebut. Menurut anggota Komisi IV DPR, Sulaeman Hamzah kepada tempo.co mengatakan, fasilitas untuk menunjang pemberdayaan petani lokal terus diberikan di antaranya traktor, pompa air, dan perlengkapan pertanian.

Selain itu, Sulaeman juga mengatakan saat ini ada 43 ribu hektar sawah di Merauke dan satu petani lokal disana bisa mengelola hingga 50 hektar areal sawah. “Dulunya, kami meragukan adaptasi petani asli Merauke dengan petani pendatang akan sulit, ternyata justru petani lokal lebih terampil dalam mengelola sawahnya,” klaimnya.

Untuk terus menggairahkan para petani, Kementerian Pertanian mengiriskan 30 ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk terus memperbaiki kondisi pertanian di Merauke. Para ahli yang datang ke Merauke akan meneliti cuaca, tanah, serta unsur sosial lainnya.

Namun, banyak persoalan yang dihadapi dalam program MIFEE ini, menurut mantan Bupati Merauke periode 2005-2010 Jhon Gluba Gebze menilai persoalan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah Merauke dalam melanjutkan program tersebut. “Kondisi MIFEE saat ini mati suri. Tidak benar kalau masyarakat adat yang menjadi kendala, tetapi birokrasi di daerah yang menjadi hambatan,” ujarnya

kepada bisnis.com.

Untuk mengatasi ‘kemandegan’ program MIFEE, pemerintah pusat dan Pemprov Papua maupun Pemda Merauke perlu duduk bersama untuk mencari solusi agar *food estate* itu dapat jalan kembali. “Ini di-clear-kan masalahnya apa. Nanti hanya tuduhan, rakyat kecil yang dituduh jadi biang kerok. Padahal, biang kerok adalah birokrasi, kalau urusan dengan masyarakat ulayat saya yang selesaikan, saya kasih garansi, saya kasih jaminan. Yang penting diatur dalam keputusan,” katanya.

Dia menuturkan solusi untuk dapat melanjutkan MIFEE dengan mengefektifkan peran pemerintah daerah Merauke. Jika Pemda Merauke tidak dapat mengatasi persoalan tersebut, katanya, maka perlu dibentuk Otorita Pertanian Merauke. Namun, tidak diperlukan membuat badan otorita jika pemda dapat mengatasi seluruh persoalan pangan skala luas di Merauke tersebut.

“Tidak perlu membuat badan selama pemda bisa mengelola, ini kebijakan nasional, ini kepentingan orang banyak. Kalau seandainya pemda tidak bisa jalan, maka harus ada badan otorita, daripada ini terbengkalai,” tambahnya.

Gebze memaparkan MIFEE fokus pada optimalisasi lahan milik masyarakat setempat yang sudah terbangun, tetapi belum digarap dengan optimal, yaitu melalui mekanisasi pertanian. **(IFR)**



HAPUS PERDA TIDAK SEMUDAH MEMBALIKKAN TELAPAK TANGAN

Usulan penghapusan ribuan perda bermasalah oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri

Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merupakan salah satu alternatif demi mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, serta sebagai pendorong produktivitas dan etos kerja dalam menghadapi persaingan antarnegara yang akan semakin sengit. Atas dasar itulah Presiden Jokowi menekankan perlunya penyederhanaan aturan agar tidak menyulitkan proses perizinan investasi. Ia juga menyarankan perizinan investasi bisa dilakukan sesingkat mungkin seperti yang sudah dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal selama ini. "Perizinan tidak perlu berlarut-larut, cukup satu sampai tiga jam selesai," ujar Jokowi kepada Antaranews.

Dalam catatan Jokowi, saat ini Indonesia memiliki 42 ribu jenis peraturan yang tidak memberikan manfaat. Aturan tersebut membuat kinerja pemerintah menjadi lamban dan terkesan mengikat. Menurutnya, Indonesia sudah saatnya membutuhkan sistem regulasi yang sederhana dan fleksibel yang dapat menjadikan pemerintah semakin lincah memainkan peran di kancah global dan sigap merespon segala kebutuhan dalam rangka menghadapi kompetisi global.

Menurut Jokowi, saat ini masih ada sekitar 3 ribu perda yang perlu direvisi. Perda tersebut menurut presiden lebih banyak menyulitkan dunia usaha. Ribuan



perda yang ada saat ini sangat bertentangan dengan undang-undang, menghambat perizinan, dan sangat membebankan beragam tarif kepada masyarakat. Regulasi tersebut dapat menghambat proses pembangunan dan menurunkan daya saing nasional.

Di tempat terpisah Mendagri Tjahjo Kumolo bukan tidak mengakui atas ribuan perda yang dianggap bermasalah. Bahkan, sejak awal memimpin Kemendagri, salah satu program yang diprioritaskan

adalah memangkas aturan-aturan di kementerian yang terlalu birokratis. Hal tersebut merupakan salah satu upaya penataan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien taat kepada hukum.

Selain itu, selama ini Mendagri sudah berupaya meluruskan banyak peraturan agar tidak tumpang tindih dan berimplikasi pada terlambatnya pembangunan di daerah. Pada 2015, misalnya, terdapat 113 perda yang dievaluasi dan dibatalkan. Pemangkasan dilakukan terhadap

perda-perda yang menghambat perijinan, investasi, pelayanan, dan retribusi-retribusi yang tidak perlu.

Rinciannya 148 Perda Provinsi, 1.062 Perda Kabupaten, serta 291 Perda Kota juga telah dikembalikan kepada pemerintah daerah, sesuai UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada periode 2010-2015. Pihaknya juga menargetkan dalam waktu dekat akan segera dilakukan penghapusan ribuan peraturan bermasalah baik di tingkat pusat maupun daerah.



Selain itu Mendagri jauh-jauh hari sudah menginstruksikan kepada seluruh pejabat eselon I, II, dan III di lingkup Kemendagri serta kepada Biro Hukum Kemendagri, untuk menghapus aturan-aturan yang menghambat pelayanan kepada masyarakat.

“Saat ini daerah harus jempit bola, bukan menunggu bola. Kita sudah mengupayakan dengan mengevaluasi peraturan yang

menghambat pembangunan daerah, kalau tidak seperti itu kita jelas akan ketinggalan,” ujar Tjahjo Kumolo kepada Republika.co.id.

Tidak sekadar penghapusan

Instruksi pencabutan ribuan perda bermasalah akan menimbulkan ragam persepsi tidak terkecuali masyarakat kalangan bawah yang menelan mentah informasi akan instruksi presiden tersebut, terlebih instruksi tersebut mendapat dukungan Mendagri.

Selaku Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri Domoe Abdie memunyai pandangan, instruksi pencabutan perda bermasalah bisa saja ditafsirkan berbeda oleh kalangan bawah terutama yang berada di daerah. Pencabutan dan larangan perda akan ditafsirkan sebagai bentuk kevakuman hukum di daerah, dengan alasan tersebut masyarakat akan menilai buruk terhadap kinerja Kemendagri selama ini.

“Masyarakat akan menganggap selama ini tidak ada aturan yang jelas. Sejatinya, ribuan perda tersebut tidak dibuat sembarangan dan tidak merugikan masyarakat pada akhirnya, perda sebenarnya memiliki semangat dan tujuan untuk memperlancar berbagai kegiatan yang ada. Selain itu, penghapusan perda tidak semudah membalikkan telapak tangan, pembuatan dan penghapusan perda membutuhkan proses pengkajian yang panjang. di sinilah peran pemerintah daerah menjelaskan ulang perintah presiden tersebut kepada masyarakat,” ujarnya.

Lazimnya, sebuah perda harus sesuai dengan kepentingan umum, Mendagri sudah pasti akan membatalkan perda jika bertentangan dengan kepentingan umum setelah dilakukan pengkajian. Selain itu Penghapusan perda pun perlu kajian mendalam, terdapat tolok ukur pemerintah pusat dapat menolak perda yang dianggap bermasalah di antaranya jika sebuah perda yang diajukan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan ketertiban umum, dan

bertentangan dengan masyarakat.

Rencana penghapusan aturan yang membebani rakyat pun perlu didukung oleh seluruh praktisi politik di Tanah Air sekiranya akan mendatangkan manfaat bagi negara. Penghapusan perda bermasalah akan membuat keteraturan perda dengan substansi menghilangkan hambatan bersifat birokrasi dan memberikan perlindungan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun saat ini, tidak sedikit perda yang terkesan lebih menekankan pada kewajiban masyarakat dan semangatnya hanya untuk meningkatkan pendapatan. Di Sumatera Utara, misalnya, tidak sedikit perda yang justru mengutamakan kewajiban negara, dalam hal pemerintah daerah untuk memperlancar dan mendukung aktivitas yang dilakukan masyarakat.

Hal itu disampaikan anggota Badan Legislasi DPRD Sumut Efendi Panjaitan kepada Covesia.com. Menurutnya tidak sedikit perda yang dibuat menimbulkan kebingungan dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU dan peraturan menteri. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak perda yang bermasalah dan menghambat tujuan yang diinginkan dari aturan tersebut. Bahkan, muncul fenomena yang cukup menarik, tidak sedikit perda yang diterbitkan tersebut sering terabaikan karena hanya digunakan ketika dibutuhkan.

“Peruntukannya tidak melihat jangka panjang, apa yang dibutuhkan dari regulasi itu,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Atas dasar itulah kebijakan Presiden Jokowi dan Mendagri dalam rangka penghapusan perda yang menyulitkan izin investasi sangat wajar. Kendati demikian, penghapusan perda tidak serta merta dilakukan, menghapus perda tidak gampang dan tentu saja diperlukan kajian yang mendalam serta butuh waktu yang tidak sebentar dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. **(MSR)**



SENIN - JUM
15.00 - 19.00
SABTU 12.00 - 15.00
KEC HARILIBUR
DAN PETUGAS
←





Larangan parkir dengan pengecualian petugas polisi di Jl. Kramat Raya, Jakarta. Tempat parkir tidak hanya dipenuhi petugas kepolisian tetapi juga oleh para pegawai yang berkantor di jalan tersebut sehingga menyebabkan kemacetan di waktu pagi dan sore hari.



BOOK

GIVE YOU
A BETTER
PERSPECTIVE

A million reasons to read a book



“Berdasarkan study yang dilakukan oleh Rush University-Medical Center menyatakan, Membaca buku dapat membuat otak bekerja lebih efisien yaitu dengan mengubah struktur *neuropathologies* yang berkaitan dengan usia.”





PHILIPS J. VERMONTE:
**“Jadi Peneliti Itu
 Harus Aktif Menulis!”**

Sebagai seorang peneliti senior, perjalanan karir Philips tidaklah mudah. Banyak badai yang ia hadapi hingga akhirnya ia berhasil menjadi direktur eksekutif CSIS (Centre of Strategy and International Studies).

Tahun 1996 bisa jadi masa yang sulit bagi Philips Jusario Vermonte. Pasalnya pria berkaca mata itu memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan advertising setelah menyelesaikan kuliahnya di jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran Bandung.

Yah, dua tahun sebelum masa reformasi berdentung itu, Philips digadang-gadang “berbelok” dari cita-cita idealisme mahasiswa, apalagi dulu dirinya sangat aktif di lembaga pers mahasiswa. “Januari 1997 saya bekerja di perusahaan advertising sementara saya lulusan HI banyak teman-teman yang mencemooh saya, dianggap saya sebagai bagian dari ujung tombak kapitalisme,” ungkap pria berdarah Minang itu.

Selagi mahasiswa, pria kelahiran Manila, 14 Juli 1972 itu merupakan salah satu pencetus lembaga pers mahasiswa di fakultasnya. “Dulu, saya melihat FISIP di Unpad lebih banyak budaya bicara daripada menulis. Seharusnya mereka lebih banyak menulis daripada bicara,” katanya.

Bersama dengan temannya, pada 1992 Philips mendirikan LPM Polar milik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD. Selama itulah ia diberi mandat sebagai Pimpinan Redaksi. Dari situlah kecintaannya melalui menulis mulai menemukan tempat. Lulus dari UNPAD di akhir 1996, lalu bekerja pada Januari 1997 di perusahaan ‘kapitalis’ tidaklah mudah, apalagi darah idealismenya masih mengalir deras. Tentu rasanya jauh berbeda dari suarasuara yang ia teriakan saat menjadi mahasiswa dulu, baik melalui tulisan maupun terjun di jalan bersama puluhan mahasiswa lain.

Sebenarnya, cita-cita Philips setelah lulus ia ingin menjadi dosen di universitas yang telah mengajarkannya banyak hal. Namun sayang, dia ditolak karena untuk menjadi dosen di UNPAD itu berarti harus ada yang keluar dulu. “Di Indonesia ini, mahasiswanya tidak punya kemewahan setelah lulus kuliah mau apa dan ke mana, mereka dituntut harus bekerja, di tengah krisis moneter itulah saya akhirnya memilih pekerjaan di advertising itu,” paparnya.

Berhenti dari Advertising

Tiga tahun berlalu, krisis moneter mengancam bangsaya yang tengah membangun cita-cita reformasi ini. Bisnis berjatuh, rupiah ambruk begitu pula dengan tempat Philips bekerja. “Di masa krismon itu sebenarnya yang paling kena dampak adalah perusahaan advertising. Mereka harus meminimalisasi pengeluaran dari segi efisiensi, ya salah satunya promosi (iklan) itu,” terangnya.

Bingung? Sudah tentu! Philips akhirnya memutuskan keluar dari perusahaan advertising yang selama dua tahun memberinya pengalaman baru. Ia masih mempunyai keinginan untuk menjadi dosen. “Saat itu saya bingung, saya juga

berusaha melamar menjadi dosen dan wartawan," katanya.

Sempat diterima menjadi wartawan di salah satu program TV nasional, semangat Philips kembali membara, terlebih TV swasta yang menerimanya konon membuka biro di luar negeri. Hanya Philips dan temannya Hanif Suranto (saat ini direktur LSPP (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan)) yang diterima pada TV nasional tersebut. Namun sayang, karena krisis moneter semua program TV yang diterimanya itu dibatalkannya. "Dampak krismon luar biasa, menampar semua program news TV nasional kala itu," imbuhnya.

Dapat Beasiswa

Pada saat yang sama, Philips melamar beasiswa pasca sarjana ke Australia. Namun ada rasa khawatir dalam dirinya karena pernah bekerja di perusahaan swasta. Saat diinterview, ia bertemu dengan seniornya dahulu. "Ada senior saya juga di interview. Dia lulus S1 di HI dan bekerja sebagai HRD di Hotel Borobudur, dia mau ambil Studi Manajemen SDM untuk program beasiswa ini. Lalu dia duluan yang diinterview, dia ditanya-tanya kenapa jurusan HI ambil Manajemen. Wah pasti saya akan ditanya seperti itu juga," ceritanya.

Tibalah giliran Philips diwawancara, benar saja! Ia ditanya sama seperti seniornya dulu, berbekal jawaban sok tahu-nya Philips lantas menjawab, "Ada orang yang loyal dengan pekerjaan, seperti teman saya sebelumnya, dia mau mengembangkan potensinya di bidang pekerjaannya, sementara saya

mau loyal dengan ilmu saya," katanya sambil tertawa.

Ternyata mereka berdua diterima, tidak ada jawaban yang salah dari keduanya. Januari 1999 Philips ke Adelaide, sementara seniornya itu ke Melbourne. "Mungkin itulah salah satu kunci bagi para pengejar beasiswa, yang penting yakin dan percaya diri aja," sarannya.

Bergabung dengan CSIS

Setelah berhasil merampungkan studi S2-nya pada 2001 Philips membuat tesis mengenai Hubungan Demokratisasi Politik Luar Negeri. Tesis Philips yang kemudian membuatnya bergabung sebagai peneliti CSIS di bawah Departemen Hubungan Internasional. "Saat itu ada banyak sekali penelitian mengenai Indonesia, namun hanya sedikit yang meneliti soal hubungan politik luar negeri," paparnya.

Bagi Philips, bekerja di CSIS sangat menyenangkan. Secara akademik, dan jaringan CSIS yang berdiri sejak September 1971 itu sudah sangat baik dibanding dengan institusi serupa di Indonesia. Di CSIS, Philips lebih mendapatkan kebebasan dibanding cita-citanya dulu menjadi dosen. "Di sini kita mau ngomong apa saja terserah, sepanjang bisa dipertanggung jawabkan. Sebagai peneliti, ruang gerak saya bebas, saya bisa mengajar, mengisi seminar, bisa produktif sebagai penulis dan peneliti," paparnya.

CSIS memang menyarankan para peneliti untuk aktif menulis di tempat lain dan mengajar sebagai

bagian dari edukasi publik. Meskipun tidak menjadi dosen tetap, saat ini Philips mengajar secara paruh waktu di Pasca Sarjana Universitas Paramadina. "Mengajar itu penting, karena kami di CSIS mendorong untuk mengajar. Kalau kita di sini hanya baca namun tidak di-share jadi nggak bermanfaat," imbuhnya.

Bagi Philips, menjadi peneliti itu harus aktif. Terutama aktif di luar dalam menulis dan menularkan ilmunya ke masyarakat. "Di CSIS itu sebetulnya tidak ada karir. Pengakuan terbesar kita sebagai peneliti itu sebenarnya dari luar. Dari orang-orang yang membaca tulisan, karya, dan opini kita. Pengakuan itu tidak harus melulu soal materi. Dengan kita membuat kajian, media dan masyarakat mengapresiasi kita itu satu hal yang membuat pekerjaan sebagai peneliti itu mengesankan," terangnya.

Pada 2005, Philips melanjutkan studi S3 di Northern Illinois University USA, mengambil Komperatif Politik secara Sainstifik. "Saya studi S3 di Amerika mengalami banyak hal baru. Penelitian di sana kuantitatif (positivistik). Biasanya di Indonesia itu kajian sospolnya kualitatif. Saya lantas belajar mengenai statistik, hal yang baru bagi saya," imbuhnya.

Sepulangnya dari Amerika pada 2011, Philips diangkat sebagai direktur Hubungan Internasional CSIS dan karirnya kini semakin melejit dengan dipercaya sebagai direktur CSIS. Prinsipnya, ilmu tidak pernah habis untuk dikejar, selalu ada ilmu baru bagi siapa saja yang tekun meraihnya. (IFR)



Gedung Pakarti Centre - Lokasi Kantor CSIS

Bidang Litbang dan Statistik Kabupaten Jombang

Menjadi Acuan Pembangunan Pertanian

Untuk membantu menghasilkan peraturan dan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran, keberadaan Litbang tentu merupakan kebutuhan wajib suatu daerah. Hasil kelitbang yang merupakan pegangan dalam pengambilan kebijakan pun merupakan sandaran bagi setiap daerah dalam meningkatkan daya saing serta menggali potensi daerahnya.

Pemahaman akan pentingnya penyediaan hasil kelitbang untuk mendukung pembangunan daerah ini, coba diejawantahkan oleh Bidang Litbang dan Statistik Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, untuk terus berkembang dan menghasilkan inovasi daerah yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh semua kalangan masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang, program penelitian dan pengembangan merupakan elemen strategis yang diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap upaya memenuhi kebutuhan serta menyediakan solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha.

Bidang Litbang dan Statistik Kabupaten Jombang yang berada di Jl. Wahid Hasyim 137, berada satu gedung bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Menurut Ahmad Yusuf, Kepala Bidang Litbang dan Statistik Kabupaten Jombang, saat ini Bidang Litbang dan Statistik selalu berupaya untuk menjadi bidang litbang yang berkualitas, serta bisa menjadi wadah bagi para peneliti lokal.

“Sesuai dengan visi Bappeda Kabupaten Jombang yang berbunyi terwujudnya perencanaan pembangunan yang sinergis, partisipatif, inovatif, dan berkualitas menuju Jombang sejahtera, litbang Jombang tentu mempunyai tugas menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat,” kata Ahmad

Kajian penelitian

Memiliki tupoksi sebagai penyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis inovatif, Bidang Litbang dan Statistik Kabupaten Jombang berperan aktif dalam pengembangan inovasi daerah. Ahmad menambahkan, saat ini sudah banyak penelitian maupun kajian yang dilakukan Bidang Litbang dan Statistik Kabupaten Jombang, baik secara swakelola maupun menggunakan jasa pihak ketiga. Penelitian terbaru yang tengah ditindaklanjuti untuk dimanfaatkan oleh masyarakat adalah hasil penelitian mengenai Hari Jadi Kabupaten Jombang

“Pengkajian tentang Hari Jadi Kabupaten Jombang saat ini sedang dalam pembahasan dengan DPRD Kabupaten Jombang, kita sedang mendorong agar di



waktu yang akan datang dapat menjadi Perda. Saat ini juga sudah dilakukan penyusunan naskah akademiknya untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujar Ahmad.

Selain itu, Ahmad juga bercerita, Bidang Litbang dan Statistik Kabupaten Jombang pernah melakukan kerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang untuk penyusunan Perhutani, sekaligus melakukan pengkajian mengenai Sungai Brantas.

Bappeda Jombang melalui Bidang Litbang dan Statistik juga pernah melakukan kerja sama dengan Pusat Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Agribisnis (P4) Fakultas Pertanian, Universitas Darul Ulum Jombang.

Kerja sama tersebut dalam bentuk melakukan pengkajian teknik kelayakan dan pembuatan lubang barokah (Biopori) pada lahan di kawasan Kecamatan Wonosalam yang bertujuan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan serta penyempurnaan perencanaan program pembangunan yang terkait dengan konservasi dan kelestarian lingkungan hidup.

“Memang kala itu Pemerintah Kabupaten Jombang memerlukan kajian yang terkait dengan potensi penurunan kualitas lingkungan hidup, potensi bencana alam, beserta alternatif pencegahannya,” ujarnya.

Program tersebut dapat meminimalisasi risiko banjir serta risiko kekeringan, khususnya pada lahan



di Kecamatan Wonosalam, program kajian itu juga memberikan wacana kepada masyarakat, khususnya yang berada di Kecamatan Wonosalam mengenai peningkatan kualitas tanah melalui teknologi biopori.

Sementara itu, sasaran lain Bidang Litbang dan Statistik Kabupaten Jombang, mengenai Optimalisasi Penelitian Dan Pengembangan Pendukung Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai 80 persen, adapun realisasi target kinerja mencapai tingkat sasaran sampai saat ini mencapai 100 persen, dan dirasa dapat memenuhi target RPJMD. Oleh karena itu. Menurut Ahmad, dalam empat tahun ke depan hal tersebut perlu dipertahankan, Ahmad juga menjelaskan beberapa faktor pendorong lain.

“Faktor pendorong tercapainya sasaran ini di antaranya adalah adanya dukungan dari *stakeholder*, akademisi, dan masyarakat. Ada pun faktor penghambat yang dihadapi yaitu adanya MoU bersama BPPT (Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi). MoU menyebabkan terhambatnya salah satu kegiatan penelitian dan pengembangan, karena harus melalui prosedur yang panjang,” ujarnya.

Terkait hal itu, Bidang Litbang dan Statistik Kabupaten Jombang juga bekerja sama dengan LP4MSTIE PGRI Dewantara Jombang untuk melakukan penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP).

Tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan sektor pertanian di setiap Kecamatan dan Kabupaten Jombang, serta untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani di setiap Kecamatan dan Kabupaten Jombang. Sementara sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah dapat tersedianya buku mengenai NTP Kabupaten Jombang dan bisa diimplementasikan di setiap kecamatan pada sektor pertanian yang meliputi sub-sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, perikanan dan kehutanan. Buku tersebut juga diharapkan akan menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan khususnya di bidang pertanian oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang pada waktu yang akan datang.

NTP juga memunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Dari angka ini, sekurang-kurangnya dapat diperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.



Salah satu kegiatan Balitbang Jombang

SEKILAS BIDANG LITBANG DAN STATISTIK KABUPATEN JOMBANG

Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kabupaten Jombang lahir dilatarbelakangi dengan Keputusan Bupati Jombang No 188.4.45/144/415.10.10./2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2014-2018 yang mengharuskan pembentukan Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik berada di bawah Bappeda.

Keputusan tersebut juga menyebutkan, Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang untuk melaksanakan sebagian tugas Bappeda di bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan serta penyelenggaraan urusan statistik.

Menurut Ahmad Yusuf, Kabid Litbang dan Statistik Kabupaten Jombang untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Litbang dan Statistik Jombang memunyai beberapa fungsi di antaranya, merumuskan kebijakan, pelaksanaan dan kerja sama di

bidang penelitian, pengembangan serta mendistribusikan hasil penelitian dan pengembangan.

“Bidang Litbang dan Statistik Kabupaten Jombang juga sebagai pusat pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi pembangunan daerah, serta Penyelenggaraan kerja sama pengembangan statistik umum, dasar dan sektoral,” ujar Ahmad.

Dalam Strukturnya, Kepala Bidang Litbang dan Statistik, membawahi Kepala Sub Bidang Litbang dan Kasubid Statistik.

Di samping kedua jabatan struktural itu, terdapat beberapa pejabat fungsional di antaranya 1 orang peneliti dan 2 orang perencana, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada PP No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dalam PP No 40 Tahun 2010 tentang Perubahan, Keberadaan Jabatan Fungsional. Pejabat fungsional lainnya adalah seorang peneliti yang merujuk pada Keputusan Bersama Kepala LIPI dan BKN No 3719/D/2004 dan No 60 Tahun 2004. Sedangkan satu orang perencana dengan merujuk pada Keputusan Bersama Kepala Bappenas dan Kepala BKN No 106/K/08/2001 dan No 34/A/2001.

Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kabupaten Jombang menyatu pada struktur organisasi

dan tata kerja Bappeda Kabupaten Jombang sesuai Perda Kabupaten Jombang No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Jombang No 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dan dijabarkan dalam peraturan Kepala Bappeda Kabupaten Jombang No 188/37/415.38/2010 tentang Uraian Tugas Para Pejabat dan Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang

Bappeda Jombang memiliki visi terwujudnya perencanaan pembangunan yang sinergis, partisipatif, inovatif, dan berkualitas menuju jombang sejahtera, dengan beberapa misinya yaitu mengembangkan

kapasitas sumber daya kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dengan rincian:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan.
2. Menyusun perencanaan pembangunan melalui penjangkauan aspirasi dan peranan seluruh *stakeholders*.
3. Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat.
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan aspek tata ruang dan daya dukung sumber daya alam.
5. Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

SEKILAS KABUPATEN JOMBANG

Cikal bakal Kabupaten Jombang diawali dengan pemindahan Kerajaan Mataram Kuno yang merupakan kerajaan terbesar di Jawa Tengah saat itu. Pemindahan dilakukan dari Jawa Tengah ke Watugaluh, Jombang pada abad ke 9 oleh Mpu Sindok sebagai Raja pada masa itu. Alasan kepindahannya adalah bahaya letusan Gunung Merapi serta semakin gencarnya serangan Kerajaan Sriwijaya.

Sepeninggal Mpu Sindok Kerajaan Mataram Kuno semakin tersudut oleh pengaruh dua kerajaan besar yakni Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit hingga menewaskan Raja mereka Dharmawangsa

seiring dengan runtuhnya kerajaan Mataram Kuno kala itu.

Pada masa Kerajaan Majapahit wilayah yang saat ini merupakan Kabupaten Jombang merupakan gerbang Majapahit, dengan Desa Trunggono, Kecamatan Jombang adalah gapura barat sedangkan Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng sebagai gapura timur.

Pada 1584 M, setelah keruntuhan Majapahit, seiring dengan penyebaran Islam di kawasan tersebut, menjadikan Kabupaten yang menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama ini menjadi bagian dari kerajaan Mataram Islam. Jombang juga pernah diduduki oleh VOC pada akhir abad ke 17 dan tentara Jepang pada 1942.

Dalam sejarahnya, Kabupaten Jombang resmi memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto pada 1910 dengan pemerintahan pertama dibawah kepemimpinan Raden Adipati Ario Soerjo Adiningrat. Selain itu, Kabupaten yang memiliki luas wilayah 115.950 hektar atau sekira 1.159,5 kilometer persegi ini juga dikenal sebagai kota santri, hal tersebut dikarenakan banyaknya sekolah pendidikan Islam (Pesantren) di wilayahnya, Jombang juga merupakan tempat lahirnya tokoh nasional seperti KH Abdurrahman Wahid, presiden RI ke-4, pendiri NU KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahid Hasyim, serta tokoh intelektual Islam Nurcholis Madjid.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memimpin Rapat Pengarahan Pejabat Struktural Eselon I, II, III dan IV di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta.



Ustadz Adam Amrullah bersama Kepala Bagian PJKSE BPP Kemendagri Teguh Narutomo dalam acara siraman rohani, Rabu 10 Februari 2016



Antusiasme peserta dalam acara siraman rohani bersama Ustadz Adam Amrullah



Foto bersama sesuai acara siraman rohani, acara dihadiri oleh seluruh staf dan pegawai yang ada di lingkup BPP Kemendagri. Tampak Ust. Adam Amrullah (Tengah) sebagai pengisi acara.



Rapat yang dihadiri oleh pejabat fungsional dan struktural BPP Kemendagri.



Para anggota Koperasi Mungil BPP Kemendagri dalam acara *outbond* di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.



Pertemuan para peneliti bersama para pakar dalam rangka penyusunan RPP Inovasi Daerah di Hotel Grand Cemara. (12/2)

GENERASI MILLENNIAL INGAT 5S 4J

Psikolog ternama, Rosdiana Setyaningrum mengatakan, ada sebuah lembaga penelitian di Amerika yang meneliti mengenai generasi millennial. Menurutnya, generasi millennial yang disebut sebagai generasi Y, terbentuk setelah generasi X. Generasi millennial ini dikelompokkan mereka yang lahir antara tahun 1970an sampai dengan 2000an.

Eksis di Sosmed

Selanjutnya, generasi ini memiliki karakter dan nilai tertentu. Seperti lebih berpikir maju, percaya diri, berpikiran terbuka dan lebih banyak menggunakan media sosial untuk pencitraan. “Biasanya, untuk orangtua yang masuk dalam generasi millennial, mereka memulai menjadi ibu pada saat usia 26 tahun, dan 61 persen di antaranya ingin anaknya aktif, lebih senang *googling* daripada membaca buku,” kata Rosdiana.

Orangtua yang lahir pada zaman generasi millennial menurut Rosdiana adalah orangtua yang 58 persen merasa paling benar tentang informasi yang didapat. Selain itu, orangtua yang lahir di generasi millennial cenderung



Rosdiana Setyaningrum
Psikolog

aktif mengumbar informasi anaknya di media sosial bahkan sejak dalam kandungan. “Orangtua generasi millennial cenderung suka *selfie*, dan *posting-posting* di sosial media,” imbuhnya.

Untuk itu, Rosdiana mengkhawatirkan generasi millennial ini dapat memberi contoh buruk bagi anaknya. “Mereka cenderung malas untuk mengikuti anaknya lari-lari. Nah supaya anak bisa *anteng*, kebanyakan orangtua millennial memberikan *gadget* pada anaknya,” tambahnya.

Yang berbahaya adalah, jika anak sejak dini sudah diperkenalkan *gadget*. Akibatnya terjadilah kekompakan antara orangtua dan anak menggunakan *gadget*. Anak jadi jarang bergerak, karena yang dihadapi adalah *games online* sambil menikmati cemilan manisnya.

Generasi Millennial Picu Obesitas

Menurut ahli gizi Dr. dr. Samuel Oetoro, MS, SpGK kebanyakan anak generasi millennial mencari sosok yang ditiru dari orang sekitarnya. “Kalau anak itu melihat orangtua bermain *gadget*, anak akan ikut-ikutan bermain *gadget*. Nah, kalau sudah kecanduan *gadget* yang olahraga hanyalah jempolnya, akibatnya anak bisa obesitas,” kata dr. Samuel.

Ia menambahkan, kebanyakan anak zaman sekarang lebih suka mengonsumsi makanan instan seperti mie. “Kandungan sodium pada mie instan itu 850 mg, padahal anak tidak boleh mengonsumsi sodium di atas 2400 mg. Kalau dia makan sehari 3x mie instan, artinya jatah garam dia harus dikurangi untuk mencegah obesitas. Padahal, kebanyakan anak sekarang tidak bisa lepas dari cemilan,

5S 4J



Dr. dr. Samuel Oetoro, MS., SpGK.
Psikolog

"Kandungan sodium pada mie instan itu 850 mg, padahal anak tidak boleh mengonsumsi sodium di atas 2400 mg. Kalau dia makan sehari 3x mie instan, artinya jatah garam dia harus dikurangi untuk mencegah obesitas"

dan *junkfood*," jelasnya.

Nah, jika anak terlalu banyak makan instan dan *junkfood*, lambat laun anak akan mengalami obesitas, pasif bergerak, dan mengalami gangguan pertumbuhan. "Jangan dilihat anak yang gemuk itu lucu, padahal mereka lagi menimbun penyakit," imbuhnya.

Agar tidak terjadi penimbunan lemak akibat kurang bergerak, Samuel mengingatkan pentingnya menerapkan 5S 4J untuk orangtua dan anak di generasi millennial ini. (IFR)

Menurut Samuel, ada lima hal yang perlu diperhatikan generasi millennial untuk selalu sehat, yakni Makan Sehat, Berpikir Sehat, Aktivitas Sehat, Lingkungan Sehat, dan Istirahat Sehat.

1S

MAKAN SEHAT

Dalam makan sehat, Samuel menyarankan untuk ingat rumus 4J

2S

BERPIKIR SEHAT

Jangan memicu stres pada anak. Ajak dia bercengkrama dan jangan terlalu menekan anak dengan keinginan orangtua. Bagi orangtua generasi millennial, ingatkan untuk selalu berpikir positif dan jangan terlalu stres memikirkan rutinitas.

3S

AKTIVITAS SEHAT

Sebaiknya orangtua ajak anaknya untuk beraktivitas di luar rumah. Jangan biarkan anak bermain *gadget* melulu. "Hal ini perlu dicontohkan dari orangtua. Ajak olahraga yang menyenangkan seperti bersepeda bersama. Batasi main *gadget* anak. Maksimal 2 jam dalam sehari," jelasnya.

4S

ISTIRAHAT SEHAT

Istirahat yang baik untuk anak-anak adalah 8-10 jam. Biasakan anak untuk tidur siang. "Kebanyakan anak enggan tidur siang, seperti anak saya. Tapi paling tidak, setelah pulang sekolah biasakan anak untuk ganti pakaian, makan siang lalu tidur. Yang penting badan diistirahatkan," ungkapnya.

5S

LINGKUNGAN SEHAT

Lingkungan sehat yang baik adalah lingkungan yang bebas dari asap rokok, ditumbuhi dengan pepohonan hijau untuk membuat udara segar. "Jangan biasakan anak menjadi perokok pasif sejak dini," tutup dokter yang mempunyai tiga orang anak itu.

1J

JUMLAH makanan yang dikonsumsi harus seimbang dengan yang dibakar. Cukupi kebutuhan karbohidrat 50-60% dari total kalori, kebutuhan lemak yang sehat < 30% dari total kalori, kebutuhan protein 15% dari total kalori, serta kebutuhan vitamin dan mineral dari makanan sehat yang dikonsumsi seperti buah dan sayur.

2J

JENIS makanan yang dikonsumsi haruslah lengkap, terutama untuk anak-anak. Cukupi nutrisinya, seperti: karbohidrat, protein, vitamin, mineral

3J

JADWAL makan harus teratur 3x sehari, yaitu pada pagi, siang, dan malam hari. Nah, untuk anak-anak sendiri, tambahkan jadwal makan dengan cemilan-cemilan sehat seperti buah, atau biskuit sehat. "Kebutuhan gizi anak itu jauh lebih besar daripada dewasa, makanya harus ditambah dengan cemilan sehat," katanya.

4J

JURUS MASAK. Sebaiknya, para ibu di rumah pandai mengolah bahan makanan yang akan dikonsumsi si kecil.

Sigi Wimala

*Cinta Mati
dengan Lari*

Perjalanan panjang seseorang yang sukses memanglah tidak mudah, begitu pula dengan perjalanan artis di dunia entertainment. Jatuh bangun, dipuji, dihina, dicaci-maki bahkan sudah menjadi makanan sehari-hari agar tetap berdiri tegak. Salah satunya, adalah artis dan model cantik **Sigi Wimala** (32).

Ditemui di suatu acara hotel bilangan Jakarta Selatan, Sigi menceritakan perjalanan berat karirnya di dunia *entertainment*. Mengawali karir di dunia *modeling* memanglah tidak mudah. Terlebih sebelum masuk dunia model, Sigi adalah atlet basket sejak duduk di bangku SMP. "Jadi perbedaannya drastis, biasanya nggak memikirkan penampilan. Tahu sendiri atlet basket itu badannya besar. Sekarang dituntut kurus, cantik, dan terawat," katanya.

Isteri dari Timo Tjahjanto itu bahkan pernah nangis di tempat lokasi pemotretan lantaran dibilang gemuk. "Waktu itu aku udah turun 7 kg, tapi aku tetap dibilang gemuk. Saat itu untuk umur 17 tahun yang baru terekspose

dunia modeling, dibilang gemuk itu aku merasa koq jahat banget, akhirnya aku gak tahan dan nangis di tempat," imbuhnya.

Sewaktu di sekolah dulu, bahkan berat badan Sigi mencapai 60 Kg lebih, berhasil menurunkan ke 45-an kg dengan perjuangan ekstra. "Bahkan untuk bisa dibilang kurus, aku harus minum obat pelangsing," katanya.

Saat berhasil menurunkan berat badan, masalah belum selesai. Kulit yang biasanya melar ketika gemuk, tentu saja saat kurus kulit mengalami *stretch mark*. "Begitu masuk di dunia model, harus *skinny*, yang *fresh diet*, merapatkan *body*, pakai obat diet yang berpengaruh ke kulit," kata ibu dua orang anak itu.

Tinggal sendiri di Hongkong

Berbagai cara Sigi lakukan agar bisa tercapai kata kurus. Termasuk olahraga. Sigi memilih

olahraga yang mudah dan murah, yakni berlari. Berawal dari keinginannya agar bisa kurus, Sigi selalu rutin berlari bahkan mengikuti berbagai macam perlombaan. "Dunia *modeling* memang seperti itu, keras dan persaingannya sangat ketat. Terus aku juga kerja di Hongkong, jadi persaingan dengan model dari negara-negara lain makin ekstra. Jadi harus hemat, bagaimanapun pengeluaran udah harus hemat," imbuhnya.

Pada usia 18 tahun, Sigi bekerja sambil kuliah di Hongkong. Ia tinggal sendiri di negeri orang, dan dengan kultur yang berbeda. "Aku sewa rumah sendiri, tinggal dengan yang kulturnya harus berbeda dengan kita, tapi aku harus happy terus biar aura cantik dari dalam terpancar," katanya sambil mengenang masa lalu.



Pada dasarnya Sigi memang suka makan, dan mempunyai gen gemuk. Mayoritas keluarganya gemuk dengan pola makan yang memicu gemuk seperti daging dan makanan bersantan. Bukan hal yang mudah bagi Sigi untuk tetap terlihat cantik dan seksi di dunia model, akhirnya Sigi pun memutuskan untuk keluar dari dunia *modeling*.

"Justru aku merasa aku lebih cantik saat aku keluar dari dunia *modeling*, yang penting aku senang. Jadi auranya keluar. Kalau *modeling*, kita pakai baju disainer, *photoshot*, dua dimensi dan nggak jadi diri sendiri. Tapi saat ini aku merasa, karakter dan *personality* aku benar-benar masuk, jadi membuatku menjadi lebih manusia dan ada rasa puas," jelas ibu dari Maxine Sara itu.

Melirik dunia lari

Saat ini, kesibukan artis yang baru saja melahirkan anak ke-duanya itu lebih suka mengisi kegiatan-kegiatan *off air*, olahraga, dan mengisi kampanye-kampanye kemanusiaan seperti kanker. "Aku lebih suka sekarang, *sharing*, *talkshow*, kampanye kanker dan olahraga lari. Di Jakarta, sekarang sudah banyak orang lari jadi aku senang sekali bisa bermanfaat untuk banyak orang," imbuhnya.

Rupanya Sigi tidak sekadar melirik dunia lari, bahkan pasca melahirkan pun Sigi tetap berlari 5 kilometer dan mengikuti berb-

agai perlombaan *full marathon* (42 km) di Amerika Serikat. "Dulu lari 5 kilo untuk ngurusin badan, sekarang lari 5 kilo itu supaya aku bisa punya banyak waktu untuk ngurusin anak. Pola pikir kita harus diubah, harus punya target yang bisa memotivasi aku. Kalau pun aku turun berat badan karena lari, ya itu bonus lah," imbuhnya.

M o -
t i v a -
s i



S i g i
k i n i
p u n b e r u -

bah, dia menyukai lari karena ingin punya waktu lebih lama untuk menemani anak-anaknya. "Dulu waktu umur 30 tahun, aku punya target untuk *full* lari marathon. Dulu mikirnya aduh berat banget. Tapi harus begitu, target itu harus ada tapi nggak usah terlalu muluk-muluk, yang penting konsisten. Kalau target satu kita sudah tercapai, nantinya target selanjutnya akan terpacu kembali," saran artis kelahiran 21 Juni 1983 itu.

Selain itu, kakak dari Agni Prat-

istha itu menyarankan, untuk lebih sehat sebaiknya manfaatkan media sosial untuk '*memfollow*' instagram atau twitter orang-orang yang banyak menginspirasi seperti atlet, atau *public figure* yang fokus terhadap kesehatan. "Memfollow mereka itu membuat saya jadi terpacu untuk bisa seperti mereka," katanya.

Kini Sigi pun selalu rutin berlari dan senam pilates. Ia bahkan sempat mendapatkan medali dalam acara akbar lari yang diadakan Nike di San Francisco, Amerika Serikat pada 2013 lalu. Sigi berhasil menyelesaikan 42 kilometer dengan waktu lima jam lima menit.

"Senang sekali mendapatkan medali *finishery* yang indah yang bukan sekadar perhiasan, tapi simbol kerja keras dan memori akan sebuah pengalaman yang luar biasa. Tiga bulan saya mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan ini, namun saya tidak akan berhenti sampai di sini, masih banyak marathon yang akan saya ingin ikuti," kata Sigi.

Mencintai olahraga seperti lari dan *pillates* akan tetap Sigi lakukan, sekalipun dia sedang mengandung atau paska melahirkan sekalipun. "Kalau terbiasa aktif saat sebelum hamil, jangan berhenti aktif saat hamil. Tapi harus tahu kondisi juga, jangan sampai merugikan kesehatan," tutupnya. (IFR)

Hanya Tukang Becak

Oleh:
Kurnia Indasah

"Kiri kiri!"

Kondektur berdiri menjuntai di pintu bis seraya melambai-lambaikan tangan.

"Yo, pasar... pasar!"

Beberapa penumpang turun, termasuk aku. Membaurkan diri dengan pengunjung pasar yang menyemut. Berjalan berdesakan. Sesekali bahuiku menyentuh pundak orang yang dibarengi teriakan "aduh!" dan ucapan "maaf, tidak sengaja" dari mulutku.

Hari ini siang sedang terik-teriknya. Matahari terpancang tegak lurus di atas cakrawala. Seluruh tubuhku berpeluh kegerahan. Jilbab hitamku serasa lengket dengan kulit kepala.

Pasar Lengkong tak banyak berubah sejak kutinggalkan berburu ilmu ke Bandung lebih dari empat tahun yang lalu, dan hanya kukunjungi setahun sekali.

Kucari jalan yang tidak terlalu ramai. Rumah yang kurindukan masih berjarak tiga kilo lagi. Sebenarnya jarak tiga ribu meter itu bukan apa-apa bagiku, yang sudah terbiasa berjalan jauh berkat tempaan di Pramuka. Tapi dengan kelelahan yang menggayuti setelah sebelas jam di atas kereta, empat puluh menit di atas bis dan seperempat jam terjebak di kerumunan pasar, sepertinya jalan kaki bukan ide bagus. Langkahku tersuruk-suruk mendukung ransel di punggung.

Satu dua ojek melewatiku, membawa penumpang. Di pinggir jalan beberapa mulut liar bersuit-suit, berteriak macam-macam. Aku tak acuh, berjalan terus, dan kelelahan terus. Di dekat kelokan kuhentikan sebuah becak yang pengemudinya mengenakan topi kumal.

"Indah ya?"

Aku urung menaiki becaknyanya. "Maaf, apanya yang indah?"

"Kamu Indah kan?"

Aku benar-benar menarik kembali kakiku ke tanah. "Iya, bapak kenal saya?"

"Aku Rasyid... Ahmad Rasyid," laki-laki itu membuka topi kumalnya. "Ingat?"

Aku terlonjak. Bagaimana bisa?

Rasyid adalah teman sekelasku selama tiga tahun di SMP dulu. Dia jagonya komputer, biang keroknya diskusi, dan ahlinya matematika. Dulu dia sekretaris umum OSIS, seksi giat ambalan, dan tak terhitung lagi banyaknya pengalaman organisasinya. Argumennya sukar ditandingi, di samping wawasannya yang seluas pasifik. Banyak guru yang dibuat malu karena tak bisa menjawab pertanyaannya.

Rasyid adalah orang yang pernah mengisi lembar-lembar hatiku lebih dari delapan tahun yang lalu. Kami putus karena aku terlalu cengeng menghadapi idealismenya. Dia bilang malu kalau sekolah hanya untuk ijazah. Saat itu aku mati-matian menentangnya. Kami putus, aku masuk pesantren, dan dia ke STM.

Rasyid, satu windu tak bertemu, mengapa jadi begini kau sekarang?

"Pulang?" tanyanya.

Aku mengangguk. Naik ke becaknyanya yang sandarannya bergambar wanita cantik dalam iklan sabun.

"Berapa anakmu sekarang?" tanyaku.

"Aku belum menikah," jawabnya.

Rasyid tetap menarik, entah dia memakai jas OSIS atau mengayuh becak. Dia tetap Rasyid. Kurasakan kembali getaran-getaran yang dulu, dulu sekali, pernah menghangatkan dadaku seperti sweater yang membungkus di musim dingin.

"Jadi kau dapat beasiswa?" komentarnya setelah kuceritakan riwayatku, "aku memang sekolah, tapi sayangnya tidak gratis. Bisa kuliah juga, tapi dengan biaya."

"Tahun kemarin program D3 ku selesai, jurusan Teknik Elektronika. IPK-ku cukup tinggi. Berpuluh surat lamaran kukirimkan pada perusahaan di sekitar Jatim, dan tak ada satupun yang ditanggapi. Mungkin karena riwayat organisasiku yang tergolong kiri. Aku

sudah mencoba menjadi sales, sopir pribadi, dealer motor, beternak kelinci... sampai berdagang majalah dan tukang cukur, tak ada yang kujalani lebih dari seminggu. Aku gagal total. Kebutuhan makin mendesak, modal pinjaman dari bank tidak kembali..."

Rasyid menyambung dengan murung, "bukan kehendakku menjalani pekerjaan seperti ini. Tapi bagaimana lagi, tiap hari orang serumah harus makan. Seberapa jumlah pensiunan kalau dibanding kebutuhan yang tidak ada habisnya? Tiga adikku juga harus tetap sekolah. Bapak

pun mesti kontrol seminggu sekali. Juga, aku harus menyicil semua utang kepada saudara-saudara bapak, yang dulu dipinjam untuk membiayai kuliahku."

Kemudian dia menambahkan dengan sedih. "Mungkin sudah garis tanganku seperti ini. Salahku juga. Dulu dengan nilaiku yang di atas rata-rata, sering aku tidak menghargai guruku sendiri. Tidak jarang aku melecehkan cara mengajar mereka yang lamban. Berapa banyak guru yang kubuat malu di depan teman-teman setelah kucecar pertanyaan? Mungkin mereka sakit hati, tidak ridha kepadaku, sehingga ilmuku tidak manfaat sama sekali!"

Ah, Rasyid ku...

Aku tahu kemana arah percakapan bapak dan emak selama dua hari terakhir ini. Akan ada seseorang yang melamarku. Seorang sepupu jauh, tinggal di Yogyakarta, bekerja di Dinas Pariwisata. Aku beberapa kali bertemu dengannya, saat ada hajatan yang melibatkan keluarga besar kami. Bayu, pemuda yang bersih, murah senyum dan mudah gugup.

Pada saat yang hampir bersamaan, dua hari yang lalu, Rasyid juga menyampaikan niatnya dalam bentuk pertanyaan.

"Tiga bulan lagi aku akan ikut anak pamanku ke Kalimantan, ke pabrik pengolahan sawit, disana paling tidak aku bisa menangani mesin. Bapakku berharap ada wanita yang akan mendampingi kesana, sebagai istriku, apa kau bersedia?"

"Dan tentu saja, selama tiga bulan ini, aku tetap akan menarik becak dulu."

Bapak dan emak pun sudah tahu hal itu.

"Kamu sudah besar nduk, sudah bisa memilih. Bapak dan emak cuma bisa memberikan saran, seterusnya terserah kamu. Kalau kamu mantep dengan yang sini, bapak akan ngomong baik-baik sama yang di Jogja sana."

Sebetulnya, aku tidak suka dihadapkan pada pilihan. Apalagi, pilihan yang menyangkut masa depanku.

Rasyid adalah cinta pertamaku. Seandainya dia sekarang guru SMP, atau wartawan koran lokal, atau pegawai PLN, tanpa ragu aku akan terima lamarannya. Tapi dia.... Aku memang tidak mengharap calon suamiku bertabur kekayaan, tapi paling tidak, aku ingin bersuamikan orang yang mapan, yang cukup namun tidak berlebihan,

yang sederhana tapi tidak kekurangan. Ini bukan materialistis, ini adalah kesadaran yang wajar. Siapa yang, di zaman perdagangan bebas ini, rela makan sesuap sehari atas nama cinta?

Dan satu lagi, aku adalah sarjana komunikasi. Rasyid juga lulusan perguruan tinggi, tapi... apa yang akan dikatakan teman-temanku kalau tahu suamiku adalah penarik becak? Dia memang akan meninggalkan becak tiga bulan lagi, tapi apakah menjamin di Kalimantan dia akan sukses?

"Aku masih mencintaimu," kata Rasyid saat menjumpaiku kemarin lusa, "aku menyesal memutuskanmu hanya karena masalah sepele."

Sejujurnya, aku juga masih mencintainya.

"Bayu memang cuma lulusan SMA, tapi dia sudah kerja di pariwisata, kang," samar-samar kudengar suara bibiku di telepon, dua hari yang lalu.

Ah, terkadang pilihan hidup memang tidak sesuai dengan pilihan hati.

Lamaranku berlangsung dengan lancar sekitar dua bulan yang lalu. Keluarga dari Yogya serta bapak dan emak telah sepakat tentang hari perkawinan kami. Dan disinilah aku, di malam yang penuh kesakralan. Bayu dituntun penghulu mengucapkan ijab dan kabul. Aku telah resmi menjadi istrinya.



Di dalam kelambu putih kamar pengantin, saat aku bersiap menyerahkan diriku pada Bayu dalam laku saresmi, dia membisikkan sesuatu.

"Aku ingin menegaskan semuanya, sebelum ada salah paham diantara kita."

Aku menatapnya yang masih mengenakan pakaian resmi temu nganten, lengkap dengan keris di pinggangnya.

"Kau tahu apa pekerjaanku?"

"Tentu saja, kau adalah pegawai dinas pariwisata, suamiku."

"Pegawai bagian apa?"

Aku berpikir sebentar. "Mungkin guide."

"Bukan. Aku tak lancar bahasa Inggris."

"Berarti kau menangani arsip di kantor."

Bayu menggeleng. "Aku adalah tukang becak. Aku dan teman-teman memang bekerja sama dengan dinas pariwisata, atau boleh dikatakan kami bekerja untuk mereka. Kami bertugas mengantarkan wisatawan asing berkeliling dengan becak. Aku adalah pegawai dinas pariwisata, tapi sejatinya aku adalah tukang becak, Indah."

Saat itu, kurasakan seperti ada sesuatu yang menggedor-gedor hatiku hingga pecah berserpihan. Ngilu kurasakan tembus sampai ke tulang. Malam itu aku memeluk Bayu sampai pagi, tapi yang ada di pikiranku hanya satu, besok aku akan minta maaf pada Rasyid dan bersimpuh di depan becakny.

Kami mengundang Anda untuk menulis cerpen.
Kirimkan naskah Anda sebanyak 8.000 karakter ke:
redaksi.mediabppkemendagri@gmail.com
dengan subyek CERPEN.

mediaBPP

Mengucapkan

Selamat Menempuh Hidup Baru kepada Rekan Kami:

**Yulianis
(Ines)**

**M. Sultan Akbar
(Sultan)**

~~~~~  
**Maretha Triandini  
(Retha)**

~~~~~  
**Dimas Aji Raharja
(Aji)**

Semoga Menjadi Keluarga yang Berbahagia

MERETAS JALAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI DESA WISATA PANGLIPURAN BALI

Karya:
M. Bashori Imron

Karya ilmiah yang berjudul meretas jalan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Desa Wisata Panglipuran Bali, yang ditulis oleh M. Bashori Imron, menyuguhkan sebuah destinasi wisata unggulan daerah yang tetap mempertahankan kultur serta mengangkat ekonomi masyarakat sekitar.

Karya ilmiah ini cukup memberi pencerahan dan bisa dijadikan referensi oleh pemerintah daerah dalam rangka mendorong potensi unggulan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah daerah khususnya kepala daerah harus memunyai imajinasi dan inspirasi agar mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, termasuk berperan besar dalam meningkatkan potensi wisata yang ada, bahkan bisa menciptakan daerah wisata baru. Tetapi, faktanya pemerintah daerah lebih senang mengurus kebijakan dan terkesan menabrakan aturan pembagian urusan pemerintahan yang mengakibatkan tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal tersebut kemudian sering menjadi penyebab suatu daerah tidak lagi produktif dan tidak menghasilkan inovasi dalam kurun waktu sekian lama, hal ini dibuktikan dengan prestasi inovasi daerah yang selalu diraih oleh suatu daerah yang sama setiap tahunnya. Di sisi lain, tingkat kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak kunjung membaik menjadikan sera-



pan PAD menurun.

Untuk itu, kepala daerah perlu ber-kaca terhadap Desa Wisata Unggulan Panglipuran Bali, keberhasilan desa tersebut merupakan contoh kecil kebijakan yang dibangun pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata tanpa memunculkan sisi negatif dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggandeng masyarakat sekitar dan memanfaatkan nama Bali yang sudah terkenal serta dengan keunikan dan keunggulan yang dimilikinya, Desa Wisata Panglipuran menjadi salah satu destinasi wisata yang dicari oleh para pelancong di Dunia. Pengembangan Desa Wisata Panglipuran Bali dapat dijadikan model pengembangan desa di daerah lain untuk menjadi destinasi

wisata baru, sekaligus bisa meningkatkan PAD.

Karya tulis ilmiah ini dibuat dengan sangat baik dengan mengambil latar belakang peran Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam mendukung program Millenium Development Goal (MDGs). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode survey sehingga penulis terlibat dilapangan secara langsung. Penulis menggunakan teori dan referensi yang sangat baik, ia berusaha menganalisis strategi wisata dan komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh Desa Wisata Panglipuran Bali.

Terdapat beberapa pihak yang berperan dalam pengembangan desa wisata panglipuran, selain pemerintah daerah terdapat juga masyarakat adat dan lembaga swasta. Selain itu, penulis tidak menampik jika ada peran lembaga pendidikan yaitu universitas Udayana di awal mula perkembangannya.

Akan tetapi, di sisi lain, karya ilmiah ini tidak menampilkan statistik dan jumlah pengunjung yang datang setiap tahunnya, padahal data statistik sangat penting untuk menunjukkan keakurasian data baik ketika desa wisata ini sudah maju seperti sekarang maupun pada awal berdirinya pada 1990. Selain itu, Kabupaten Bangli tempat di mana Desa Wisata Panglipuran berada, tidak terlalu dimunculkan, peneliti hanya mengusung Bali yang sudah terkenal, sehingga penelitian yang bersifat informatif dan persuasif ini tidak sejalan dengan konsep awal yang mengusung kedaerahan. (MSR)

INDONESIA DI NEGERI ORANG

Dunia perfilman Indonesia boleh jadi mengalami kemajuan yang cukup signifikan, terutama dalam alur cerita dan setting tempatnya. Beberapa film yang tayang pada akhir 2015 dan awal 2016 banyak dilirik karena telah memberikan nafas segar dalam dunia perfilman. Dirilis dari berbagai cerita yang inspiratif dan menggugah semangat. Proses produksi yang tentunya 'luar biasa' dari dua film di bawah ini menjadi goresan sejarah yang tidak boleh dilupakan bagi para penonton. Melihat perjuangan mereka yang tinggal di negeri orang. Dicap teroris, terasingkan, bahkan seperti dipenjara tanpa jeruji akan menggugah para penontonnya untuk lebih mencintai bangsanya sendiri. Mau tahu seperti apa penggalan kisah dalam film berlatar luar negeri? Yuk kita intip ulasannya.



Bulan Terbelah di Langit Amerika

Genre : Drama
Produser : Ody Mulya Hidayat
Sutradara : Rizal Mantovani
Penulis Naskah : Hanum Salsabiela Rais
Durasi : 92 Menit
Pemain : Acha Septriasa, Abimana Aryasatya, Nino Fernandez, Rianti Cartwright
Produksi : Maxima Pictures
Rilis : Desember 2015

Sukses dengan film 99 Cahaya di Langit Eropa, rupanya membuat penulis naskah sekaligus tokoh utama dalam film ini Hanum Rais (Acha Septriasa), terus merilis film berlatar belakang luar negeri. Lagi-lagi, anak dari politisi Amien Rais itu menceritakan perjalanan hidupnya selama menjadi wartawan di luar negeri. Hanum, tidak hanya menyuguhkan bagaimana kehidupan orang Indonesia di langit Amerika, tetapi ia juga menyoroti negara dengan penduduk Muslim terbesar itu beradaptasi dengan orang Amerika.

Cerita ini berlatar belakang kejadian bom WTC (World Trade Center) pada 11 September 2001 silam, atau yang biasa dikenal dengan peristiwa 9/11. Setelah kejadian tersebut, umat muslim di Amerika dipandang sebelah mata, mereka dianggap sebagai 'teroris'. Peristiwa tersebut yang nantinya menjadi tantangan bagi Hanum untuk menulis sebuah artikel bertema "Would the world be better without Islam?" (apakah dunia lebih baik tanpa Islam?).

Hanum diperintahkan oleh Gertrude Robinson untuk mewawancarai dua narasumber dari pihak muslim dan non muslim yang menjadi keluarga korban peristiwa 9/11. Di waktu yang sama, Rangga suami hanum (Abimana) yang sedang kuliah di Wina mendapatkan tugas dari Professor Reinhard untuk pergi ke Washington, agar bisa mengikuti sebuah konferensi internasional dalam bidang bisnis. Dalam konferensi tersebut yang nantinya akan membahas seorang filantropi dunia bernama Brown Phillipus tentang "Strategi The Power of".

Rangga dan Hanum pergi ke Washington dan menumpang di salah satu teman Rangga. Disitulah mereka mulai bertengkar karena kesibukan masing-masing, Rangga harus mewawancarai Mr. Brown, sementara Hanum harus mewawancarai Julia Collins (Rianti Carthwright), isteri dari Husein (terduga teroris 9/11).

Pencarian terhadap satu narasumber lagi akhirnya berakhir dengan susah payah, apalagi pada saat itu sedang memperingati kejadian 9/11 di kompleks

RESENSI
FILM

Ground Zero (titik runtuh gedung WTC yang saat itu masih dalam konstruksi). Hanum bertemu dengan pria 'anti Islam' yang menolak pembangunan masjid di lokasi Ground Zero. Kerusuhan pun terjadi antara demonstran dan aparat keamanan setempat. Membuat Hanum yang saat itu tengah berada di lokasi harus ikut dalam upaya mengamankan diri.

Hanum akhirnya berlingkup di sebuah masjid yang dijadikan isu kerusuhan. Ia bertemu dengan Julia Collins, seorang muallaf yang memiliki nama Azima Hussein. Dari sinilah petualangan Hanum dimulai. Hanum mulai menemukan serpihan jawaban dari tema artikelnya mengenai "Would the world be better without Islam?". Di sisi lain, Rangga tak sengaja bertemu dengan Phillipus Brown dan melakukan wawancara cepat tentang mengapa Brown menjadi seorang filantropi. Seorang sekretaris Mr. Brown berkata, Rangga harus memberikan satu pertanyaan menarik

jika ingin bertemu dengan Mr. Brown. Terlontarlah kalimat "Would the world be better without Islam?".

Sebuah kejadian yang dialami Rangga dan Hanum secara tak terduga akan mempertemukan Jones, Julia, dan Brown dalam sebuah pertemuan manis yang menggetirkan ketika Brown mengisahkan apa yang melandasinya menjadi seorang filantropi dunia pada acara *The Heroes*.

Kisah dibalik 9/11 tentunya banyak menginspirasi kita semua akan kehidupan Islam di negeri orang. Setting tempat, dan pemain yang kualitas sudah tidak diragukan ini, menjadi inspirasi umat manusia secara langsung dibawakan melalui pesan moral film tersebut. Namun sayangnya di akhir film, terkesan terlalu memaksakan sehingga ending terlihat buru-buru. Tapi secara keseluruhan film ini tidak akan membuat rugi setiap orang yang mengeluarkan uang untuk membeli tiket film besutan Rizal Mantovani ini. **(IFR)**



Surat dari Praha

Genre : Drama/Musikal
 Produser : Anggia Kharisma, Handoko Hendroyono, Chicco Jerikho, Angga Dwimas Sasongko, dan Glenn Fredly
 Sutradara : Angga Dwimas Sasongko
 Penulis Naskah : M. Irfan Ramli
 Durasi : 100 Menit
 Pemain : Julie Estelle, Tio Pakusadewo, Rio Dewanto, Chicco Jerikho
 Produksi : Visinema Pictures
 Rilis : Januari 2015

Jaya menjadi eksil karena sepuh hatinya menolak Orde Baru. Ia dibuang, kewarganegaraannya dicabut, puluhan tahun tidak bisa pulang, tidak bisa bertemu dengan kekasih hatinya Sulastri (Widyawati). Ia hanya bisa member kabar lewat surat-surat yang baru dia tulis 20 tahun kemudian. Yah! 20 tahun kemudian, Sulastri sudah milik seseorang.

Rumah tangga Sulastri hancur. Dahayu Larasati (Julie Estelle) anak Sulastri, menuding Jaya dan surat-surat yang pernah dikirimnya sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarganya. Situasi berdampak buruk bagi kehidupan keluarganya. Karena tersudutkan, Jaya merasa terpaksa untuk menjelaskan kejadian sebenarnya yang telah ia ikhlaskan.

Laras tiba di flat Jaya, membawa serta sebuah kotak kayu dengan sepucuk surat dari ibunya. Pertemuan dengan Jaya membuat Larasati mengetahui persoalan yang sebenarnya. Cerita ini memberikan pesan moral pada penontonnya tentang kekuatan memaafkan dan upaya untuk berdamai dengan masa lalu.

Cerita dalam film ini benar-benar dikemas secara apik dan dapat dinikmati tanpa terjebak dalam upaya pengungkapan kebenaran. Meski mengangkat peristiwa 1965, tidak ada adegan *flashback* yang klise dalam film ini. Semua dituturkan dalam waktu yang sekarang. Sutradara film ini, Angga berhasil menuturkan fragmen kecil dari tragedi besar di negeri ini yang dialami oleh orang-orang yang tidak tercatat dalam buku sejarah. **(IFR)**

Pergolakan politik 1965 membuat ribuan pelajar di luar negeri yang mendapatkan beasiswa di era Soekarno, menuntut mereka harus menandatangani pernyataan sebagai pendukung Orde Baru. Mereka yang menolak akan dihapus kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia.

Terombang-ambing, tak tahu harus bermuara kemana. Para pelajar itu tak mendapat tempat di tanah kelahirannya. Bahkan untuk mendapatkan

kewarganegaraan dari tempat mereka menuntut ilmu, butuh waktu yang sangat lama.

Adalah Mahdi Jayasari (Tyo Pakusadewo), seorang Sarjana Nuklir dari Praha salah satunya. Jaya yang kini menjadi petugas kebersihan di gedung opera, tetapi sering berlagak sebagai konduktor yang mengarahkan permainan musik itu, tinggal seorang diri ditemani seekor anjing bernama Bagong yang sering ia ajak bicara dalam bahasa Jawa.

PILKADA SERENTAK DALAM KACAMATA TJAHJO KUMOLO

Pada 9 Desember lalu, Indonesia kembali merayakan pesta demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Pilkada serentak yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat mengenai persiapan dan kesuksesannya menjadi harapan sekaligus kecemasan bagi bangsa Indonesia. Perjalanan panjang yang rumit dan tidak mudah akhirnya memutuskan sebuah kesepakatan yang tertulis dalam UU No. 8 Tahun 2015. Proses legalisasi yang tarik-ulur, dan alot itu diceritakan dengan detail dalam buku yang ditulis langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Dalam buku ini Tjahjo menuliskan perdebatan panjang antara kubu KIH (Koalisi Indonesia Hebat) yang memperjuangkan pilkada langsung dan kubu KMP (Koalisi Merah Putih) yang menyarankan pilkada tak langsung (dikembalikan ke DPRD). Tentunya, perjuangan ini bukan tanpa hasil. Hampir lima tahun pembahasan ini bergulir. Pada 2010, pembahasan revisi terhadap UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) telah dilakukan pemerintah dan DPR, bahkan sejak setahun setelah DPR Pemilu 2009 dilantik. Terjadi perubahan klausul substansial yang menimbulkan beberapa kali masa sidang. Perbedaan pendapat terjadi bukan hanya di antara Kementerian Dalam Negeri dengan DPR, bahkan di internal DPR pun terjadi perbedaan pendapat di antara fraksi-fraksi dewan.

Di akhir masa jabatan DPR periode 2009-2014 atau tepatnya lima hari sebelum DPR periode 2014-2019 dilantik, parlemen menetapkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada yang menyatakan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Tentu hal ini mendapatkan banyak protes dan kritik dari masyarakat, sebab DPR dianggap telah merampas suara rakyat untuk menentukan kepala daerahnya sendiri. Beruntung, di akhir jabatannya presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Perppu (Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang). Yakni Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perppu itu sekaligus mencabut UU No 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan



JUDUL
Politik Hukum Pilkada Serentak

PENULIS
Tjahjo Kumolo

PENERBIT
Expose

TEBAL
260 Halaman

HARGA
Rp 65.000,-

TAHUN
Desember 2015

Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai konsekuensi penetapan Pilkada Langsung, yang akhirnya menjadi dasar legalitas dalam pilkada serentak saat ini.

Dalam perjalanannya, Perppu itu akhirnya disahkan dalam UU No 8 Tahun 2015 yang salah satunya mengeluarkan butir 'g' membahas mengenai formulasi ulang tahapan Pilkada Serentak yang dibagi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada Desember 2015 (untuk akhir jabatan 2015 dan semester pertama tahun 2016) yang meliputi 9 provinsi (260 kabupaten/kota), Gelombang Kedua pada Februari

2017 (untuk yang akhir masa jabatan semester kedua tahun 2016 dan seluruh akhir masa jabatan 2017) yang meliputi 8 provinsi (94 kabupaten/kota), dan Gelombang Ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 (untuk yang akhir masa jabatan 2018 dan akhir masa jabatan 2019) yang meliputi 17 provinsi (154 kabupaten/kota). Sementara untuk serentak Nasional akan dilaksanakan tahun 2027.

Pembagian menjadi tiga gelombang ini karena mempertimbangkan pemotongan periode masa jabatan yang tidak terlalu lama. Selain itu untuk menghilangkan kata 'spontan'. Coba pikirkan baik-baik, pilkada serentak pada Desember lalu, memilih 269 kepala daerah terdiri dari 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten daripada memilih dalam waktu dua sampai tiga hari memilih 34 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota?

Namun sayangnya, tidak seperti pada judul buku "Politik Hukum Pilkada Serentak" dalam buku ini Tjahjo tidak menjelaskan masalah-masalah apa saja yang terjadi pada pilkada gelombang pertama. Seperti yang terjadi pada Pilkada di Kalimantan Timur dan daerah-daerah yang mengalami sengketa dalam Pilkada serentak 9 Desember lalu. Sehingga, semua pembaca tidak dapat belajar dari kekurangan pilkada serentak gelombang pertama.

Dalam bukunya, Tjahjo menjelaskan secara detail bagaimana perjalanan dan urgensi Pilkada Serentak ini sebagai suatu wujud memantapkan kembali arah demokrasi dengan kebebasan yang beradab dalam membangun budaya politik baru, dan meminimalisasi kecurangan dan politik uang, serta membatasi politik dinasti dengan harapan penguatan otonomi daerah. Tentunya, bukan tanpa menolak kritik, Tjahjo mengaku banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Tapi kekurangan ini harus tetap berjalan sambil terus saling menyempurnakan dan didukung penuh oleh semua lapisan masyarakat. (IFR)



Moh. Ilham A. Hamudy

CERITA DARI 6 DESA

Tulisan ini adalah tentang pemekaran daerah yang berujung kisruh. Galibnya sebuah pemekaran daerah, memang kerap berujung kisruh. Akan tetapi, kisruh yang diangkat dalam tulisan ini bukanlah kisruh yang biasa. Meski cuma dalam skop desa, penanganannya cukup membuat pusing petinggi pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.

Pasalnya, enam desa yang diklaim pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dengan Kabupaten Halmahera Utara (Halut) itu saling bersikeras mempertahankan pendapatnya masing-masing. Impaknya, di wilayah yang bersengketa itu kini muncul dualisme pemerintahan. Di sana, kini ada dua kecamatan dan 12 kepala desa yang berdiri berasingan secara administratif.

Sebagai latar belakang, perlu dijelaskan, konteks sengketa wilayah di enam desa yang melibatkan Kabupaten Halbar (kabupaten induk) dengan Kabupaten Halut (kabupaten baru) senyatanya telah berlangsung sejak 2003 (pasca pemberlakuan UU No 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara). Namun hingga saat ini, belum ditemukan titik kompromi yang bisa diterima oleh kedua pihak.

Konflik masa lalu

Kalau ditelusuri, persoalan enam desa itu ternyata masih terkait dengan situasi konflik di masa lalu, khususnya implementasi PP No 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku yang mengalihkan wilayah enam desa dari Kecamatan Jailolo ke Kecamatan Makian Malifut.

Walaupun secara de jure wilayah enam desa telah dialihkan ke dalam Kecamatan Makian Malifut, tetapi aspek pelayanan pemerintahan tetap dilaksanakan



sebagaimana biasanya oleh Kecamatan Jailolo. Hal ini karena bersamaan dengan pemberlakuan PP tersebut, terjadi konflik kekerasan di wilayah Malut dalam kurun waktu 1999-2000.

Ketika terjadi pemekaran daerah otonom melalui UU No 1 Tahun 2003, wilayah enam desa yang telah dialihkan ke dalam Kecamatan Malifut, masuk dalam wilayah Kabupaten Halut. Hal ini kemudian dipersoalkan oleh Kabupaten Halbar selaku kabupaten induk. Pemerintah Kabupaten Halbar dengan pertimbangan de facto tetap mengklaim wilayah enam desa. Dukungan ini semakin diperkuat dengan munculnya Surat Permohonan No 03/KSP/2003, tanggal 8 November 2003 (ditandatangani oleh enam kepala desa) kepada Bupati Halbar, yang menginginkan untuk tetap menjadi bagian dari Kabupaten Halbar.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Halbar meneguhkan permohonan itu dengan menerbitkan Perda No 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur di mana keenam desa tersebut yaitu Desa Bobaneigo, Akelamo Kao, Tetewang, Akesahu, Dum Dum, dan Pasir Putih termasuk di dalamnya.

Saling mempertahankan

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Halut juga berpegang pada aspek de jure (PP No 42 Tahun 1999 dan UU No 1 Tahun 1999). Berbagai upaya ditempuh oleh kedua pemerintah kabupaten untuk mempertahankan wilayah enam desa, bahkan kedua unsur pemerintah daerah (Bupati/Wakil Bupati dan DPRD) saling memberikan dukungan sesuai kapasitas yang dimiliki. Hal ini diwujudkan dengan terbitnya Perda No 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa-desa di Kabupaten Halut dan Perda No 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Halut.

Selain itu, Surat Menteri Dalam Negeri No 136/461/PUM tertanggal 28 Juni 2005 tentang Penyelesaian Status 6 Desa; Surat Menteri Dalam Negeri No 146/1191/SJ tertanggal 7 Juni 2006 tentang Penegasan Status Wilayah 6 Desa; Surat Menteri Dalam Negeri No 146.3/111/SJ tertanggal 15 Januari 2010 perihal Penegasan Status Wilayah



Desa Bobaneigo, salah satu desa yang terlibat dalam kisruh antardesa di Kabupaten Halmahera Barat

6 Desa dan Surat Menteri Dalam Negeri No 140/115/PUM tertanggal 15 Januari 2013 perihal Status Wilayah Administrasi 6 Desa tidak berjalan efektif sebagaimana diharapkan, kalau tidak mau dikatakan diabaikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Halut, dan Pemerintah Kabupaten Halbar.

Pokok persoalan lainnya adalah masalah keberadaan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Daerah eksploitasi emas PT NHM berada pada wilayah Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halut yang secara yuridis enam desa masuk di dalamnya. Oleh karenanya, pendapatan daerah dari produksi tambang emas PT NHM masuk ke dalam kas Kabupaten Halut, sementara dana Comdev/CSR diberikan kepada warga yang masuk ke dalam sistem administrasi

kependudukan Kabupaten Halut. Demikian halnya dengan proses rekrutmen tenaga kerja lokal, di mana PT NHM hanya mau merekrut pekerja (rendahan) yang memiliki identitas kependudukan (KTP) Kabupaten Halut.

Persoalan muncul ketika sebagian besar masyarakat enam desa menolak masuk ke dalam administrasi kependudukan Kabupaten Halut. Karena mereka hanya memiliki KTP Kabupaten Halbar, maka dengan sendirinya mereka tidak dapat bekerja di PT NHM serta tidak mendapat jatah dana Comdev/CSR sungguh pun mereka tinggal di kawasan tambang yang sama-sama mendapatkan eksternalitas dari kegiatan produksi pertambangan. Kondisi ini terjadi semenjak 2006 ketika kedua pemerintah kabupaten mengeluarkan peraturan daerah tentang status enam

ATEN HALMAHERA UTARA

AN KAO TELUK

AWARATAN DESA (BPD)

BOBANEIGO

altim, Kode Pos 97764

desa. Padahal, sebelum 2006, seluruh masyarakat enam desa mendapatkan pembagian jatah Comdev/CSR dari PT NHM.

Penyelesaian komprehensif

Agar tidak berkepanjangan, penyelesaian sengketa wilayah enam desa itu mesti segera diselesaikan. Oleh karenanya, upaya komprehensif patut dilakukan agar permasalahan tidak terus berlarut. Beberapa langkah yang patut ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, Menteri Dalam Negeri perlu segera memanggil Gubernur Maluku Utara untuk melakukan klarifikasi tindak lanjut Surat Mendagri perihal penyelesaian/penegasan status batas wilayah enam desa yang menjadi sengketa Kabupaten Halbar dan Kabupaten Halut.

Kedua, memanggil Bupati Halbar dan Bupati Halut untuk melakukan evaluasi terhadap Perda Kabupaten Halbar dan Perda Kabupaten Halut terkait dengan enam desa yang menjadi sengketa kedua kabupaten tersebut. Ketiga, jika hasil klarifikasi kepada Gubernur Malut dan Bupati Halbar diindikasikan ada kesalahan (pembiaran/penyimpangan/pembangkangan) terhadap UU No 1 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaan lainnya, pemerintah pusat (Kemendagri) dapat melakukan pembatalan Perda Kabupaten Halbar No 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur di mana keenam desa tersebut yaitu: Desa Bobaneigo, Akelamo Kao, Tetewang, Akesahu, Dum Dum, dan Pasir Putih termasuk di dalamnya.

Keempat, sejalan dengan

pembatalan Perda No 6 Tahun 2006 tersebut perlu dipikirkan bagaimana mengakomodasi para kepala desa di wilayah enam desa yang Pro-Kabupaten Halbar yang otomatis akan hilang jabatannya sebagai kepala desa agar tidak terjadi kericuhan dan gejolak politik.

Kelima, selanjutnya, Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kepada Bupati Halbar dan Bupati Halut yang isinya (a) memerintahkan Bupati Halbar untuk segera mensosialisasikan semua regulasi penetapan enam desa yang menyatakan keenam desa tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Halut (b) menjamin tidak ada diskriminasi pelayanan dan pembangunan kepada warga Halbar yang berintegrasi dengan Kabupaten Halut (c) membuat program dan kegiatan bersama dalam rangka mempercepat asimilasi warga di enam desa itu agar tetap bergabung dengan Kabupaten Halut (d) melakukan pemekaran desa (sesuai ketentuan yang berlaku) bila dirasa perlu.

Keenam, sebagai solusi lain, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan usulan menggabungkan wilayah enam desa yang pro Kabupaten Halbar untuk menjadi bagian dari Kota Sofifi (Ibukota Provinsi Maluku Utara). Pertimbangan utama solusi ini adalah adanya kemudahan dan kedekatan akses pelayanan ke Kota Sofifi ketimbang ke Jailolo, Halbar atau ke Tobelo di Halut. Akan tetapi, alternatif ini membutuhkan waktu lebih lama karena harus menunggu pembentukan Kota Sofifi.

Penulis, berkhidmat di BPP Kementerian Dalam Negeri



2016 Revolusi Mental Harus Terus Digelorakan

JAKARTA - Sebagai poros pemerintahan Kemendagri akan terus menggelorakan dan mempraktikan isu revolusi mental, agar bisa diserap dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari itu kemendagri selaku pemerintah akan selalu berusaha hadir di tengah masyarakat, sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo. Demikian pernyataannya kepada *Koran-jakarta.com*.

Menurut Mendagri, revolusi mental tersebut akan mulai dilakukan kepada calon pegawai negeri sipil. Kepada *Rakyat Merdeka*, Mendagri mengatakan, pihaknya saat ini akan melakukan penataan ulang terhadap seluruh IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) yang ada.

Mendagri juga sudah mempersilahkan KPK dan BPK memantau institusi tersebut, mendagri juga tidak ingin jika terjadi sesuatu lagi di IPDN, seperti kasus kekerasan terhadap mahasiswa. ia sudah memberikan *warning* untuk tidak segan-segan mengeluarkan mahasiswa tersebut. Tak hanya kepada mahasiswa termasuk juga kepada rektor dan para kepala-kepalanya.

Mendagri juga mengatakan tata kelola tersebut dilakukan dari mulai proses rekrutmen seperti terdapat standar calon mahasiswa baru dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi seperti akademi militer. **(MSR)**



terus memonitor dan menginventarisasi seluruh ormas yang terindikasi menyimpang, seperti organisasi ajaran sesat yang berkedok kegiatan sosial.

Mendagri mengatakan, Gafatar merupakan turunan dari Al-Qiyadah Al-Islamiah yang didirikan Ahmad Mushadeq (*Tempo*, 14/1). Pihaknya telah melarang ajaran gafatar yang kini telah menyebar ke seluruh Indonesia dan mempunyai 34 Dewan Pimpinan Daerah.

Larangan itu dikeluarkannya setelah berdiskusi dengan Jaksa Agung, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dengan membentuk Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat. Menurutnya, pelarangan itu sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

Sementara itu laman resmi Kemendagri (*Mendagri.go.id*) menyebutkan, Mendagri saat ini berencana memanfaatkan APBD untuk kebutuhan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan forum kemasyarakatan sebagai upaya peningkatan kordinasi pemerintah dan masyarakat untuk memantau organisasi diduga menyimpang dan gerakan radikal.

“Kita butuh mata dan telinga masyarakat. Perlu pantauan terorganisir. Bukan hanya di tingkat provinsi, namun kabupaten/kota hingga ke desa/kelurahan,” kata Tjahjo saat menghadiri Musyawarah Pimpinan Nasional II Kosgoro 1957, Jumat (15/1).

Mendagri akan melibatkan seluruh unsur masyarakat hingga ke tingkat bawah. Bahkan, sudah menyiapkan payung hukum agar Kepala daerah tidak khawatir mengucurkan dana tersebut kepada masyarakat dan Forkompinda. **(MSR)**

Mendagri Pantau Ancaman Gerakan Menyimpang di Daerah

JAKARTA - Sebulan terakhir media dihebohkan dengan pemberitaan mengenai Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Beberapa pengamat menilai, organisasi tersebut merupakan gerakan yang berseberangan dengan ideologi kebangsaan.

Gafatar menjadi sorotan lantaran keberadaannya yang meresahkan masyarakat, oleh sebagian orang ajarannya dianggap sesat. Kepada *Media Indonesia*, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan akan terus melakukan pemantauan di setiap daerah terkait keberadaan Gafatar. Bahkan Mendagri memerintahkan untuk dilakukan penutupan terhadap kantor Gafatar jika ada yang masih beroperasi dimanapun.

Mendagri telah mengirim pesan kepada setiap Kepala Daerah dan Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota untuk



Mendagri: Pusat dan Daerah Harus Deteksi Dini Keberadaan Aksi Teror

JAKARTA - Teror bom yang terjadi di Kawasan Sarinah Jl. MH Thamrin, Jakarta, baru-baru ini membuat kaget semua pihak, publik diminta untuk semakin meningkatkan kewaspadaannya terhadap kemungkinan aksi teror yang akan terjadi selanjutnya. Kejadian tersebut menjadi isyarat bahwa pemerintah harus lebih fokus dalam menjamin keamanan masyarakat. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam situasi negara saat ini. Negara wajib memberikan keamanan dan kenyamanan kepada segenap lapisan masyarakat.

Kepada *Detik.com* Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan apresiasi atas kerja cepat TNI dan POLRI dalam penanganan teror bom di Thamrin pada Kamis (14/1) kemarin. Minimnya korban yang jatuh dari pihak masyarakat menjadi alasan utama JK, selain itu pelaku aksi teror pun berhasil dilumpuhkan.

Dari laman *Kompas.com*, saat ini Mendagri Tjahjo Kumolo akan mengupayakan seluruh korban baik yang berasal sipil maupun Polisi dalam aksi teror tersebut, agar bisa mendapat pembiayaan penuh dari negara. Hal itu, disampaikannya langsung ketika mengunjungi para korban di RSCM Jakarta, Kamis (14/1) lalu.

Tjahjo meminta kepada seluruh masyarakat untuk tak perlu takut menghadapi teroris. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan semua pihak baik pusat maupun daerah untuk selalu mendeteksi dini keberadaan dan aksi teror yang akan terjadi selanjutnya. Menurutnya Indonesia adalah negara besar, Tjahjo meminta kepada semua kalangan untuk bersatu dan tak boleh ada siapapun yang bisa merusak kedaulatan bangsa Indonesia.

Kejadian aksi teror tersebut, mengundang komentar dari Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) Prof Salim Said, menurutnya ada kemungkinan Indonesia untuk di serang kembali cukup besar. Pihak teroris dinilainya cukup berhasil karena dengan hanya lima orang saja, mereka sudah bisa mengguncang dunia. Disampaikannya kepada *Okezone.com*, saat menghadiri acara Perspektif Indonesia dengan topik: Mengapa Teror Jakarta Gagal Meneror Kita di Jakarta, Sabtu (16/1/2016).

Waspada ISIS

Sementara dalam Rapat Pengarahan Pejabat Struktural di lingkungan Kemendagri, di Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta. Tjahjo berpesan, Indonesia untuk senantiasa

mewaspada penyebaran ISIS (Negara Islam Iran Suriah) yang menyebarkan ajaran radikalisme di tanah air.

Tjahjo mengingatkan, kelompok ISIS kini tak lagi menyerang kelompok muslim Indonesia saja, tetapi juga kelompok non muslim. "Yang berbahaya, mereka kaum konglomerat bergabung dengan ISIS. Mereka terlihat seperti kebanyakan orang, membangun usaha minyak dan memengaruhi warga dengan nilai radikalisme," kata Tjahjo.

Pada masa mendatang, Tjahjo berharap ada pengenalan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat tentang penting pedoman Pancasila dan keberagaman bangsa Indonesia. Sekadar informasi, Kelompok ISIS adalah kelompok teroris dari penerus Al-Qaeda yang membentuk nama Negara Islam Iran Suriah.

Misi ISIS adalah menarik simpati dunia untuk membangun Khilafah Islamiyah sendiri. Kelompok ini digadang-gadang sebagai penyebab terjadinya penembakan di Paris pada 13 November lalu yang menewaskan 132 orang dan 350 orang luka-luka.

Bahkan, Departement Keuangan Amerika Serikat mengatakan ISIS adalah organisasi teroris terkaya sedunia, yang dapat menghasilkan dana 40 juta USD per bulan yang berasal dari ladang minyak. (MSR)



Penghapusan BP Batam Solusi Percepatan Pembangunan

JAKARTA - Kerugian potensi pajak sekitar RP 20 triliun di Batam, Kepulauan Riau, membuat Mendagri Tjahjo Kumolo berencana membubarkan Badan Pengusaha (BP) Batam. Awal 2016 adalah target pembubaran tersebut, percepatan pembangunan merupakan alasan utama pembubaran BP Batam tersebut.

Kepada *Tribunbatam.com*, Mendagri mengatakan, selama ini ada duplikasi dan konflik kewenangan antara BP Batam dan Pemda Batam sehingga menghambat pembangunan kawasan Batam selama sepuluh tahun terakhir. Selain itu, tumpang tindih kewenangan menjadi salah satu kendala sulitnya menjaring investor ke Batam.

Selain beberapa hal tersebut, keistimewaan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, kerap

dimanfaatkan oleh pihak lain. Dari itu, pembahasan mengenai polemik kawasan tersebut yang dilakukan oleh Mendagri bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri diharapkan secepatnya dapat menghasilkan keputusan resmi.

Penyaluran Dana Desa Akan Terus Dimaksimalkan

JAKARTA - Lahirnya UU Nomor 6/2015 tentang Desa merupakan sejarah baru bagi pembangunan bangsa Indonesia. Desa akan menuju arah pembangunan yang lebih jelas dan mandiri. Perhatian dan kedudukan desa sudah diperkuat secara fundamental dan masyarakat desa menjadi subjek protagonis.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar kepada Koran Sindo mengatakan, Pada 2016, dana desa akan mengalami kenaikan dua kali lipat lebih dari tahun sebelumnya, yakni Rp 20,7 triliun menjadi Rp 47 triliun. Bukan hanya itu, proses pencairannya pun akan dipermudah agar tidak menyulitkan masyarakat.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo kepada *Detik.com*, pencarian dilakukan harus semudah mungkin, menurutnya saat ini penyebab lambatnya pencairan dana desa adalah karena penyusunan anggaran yang dianggap rumit. Di sisi lain, masih banyak alasan yang terkesan mengada-ada. Maka dari itu regulasi penyederhanaan dana desa memang sangat diperlukan.

Tjahjo mengatakan penyaluran dana desa di tahun ini telah mencapai target. Namun ia mengaku banyak kendala dan sasaran yang belum tercapai. Kendala penyaluran misalnya, dana desa dari pusat sendiri



menurut Tjahjo sudah 80 persen sampai ke kabupaten. Tetapi memang dari kabupaten sebagian besar belum sampai ke desa. Menurutnya, selanjutnya akan ada sanksi bagi kabupaten yang tak menyalurkan dana desa. Tetapi hal itu akan disesuaikan dengan temuan BPK selaku pihak yang melakukan audit.

Kepada *Indopos.com*, Mendagri mengatakan kawasan tersebut akan digantikan namanya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), selanjutnya setelah berganti nama segala kewenangannya akan dilimpahkan ke Pemda. (MSR)

Disamping itu, Kemendagri akan terus melakukan evaluasi mengenai penyaluran dana Rp 1 miliar untuk masing-masing desa dengan Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan. Menurutnya, saat ini selain banyak sasaran belum tersentuh, arahan Presiden Joko Widodo terkait program padat karya belum terealisasi dengan baik di daerah-daerah.

Menanggapi capaian yang kurang memuaskan ini, Kemendagri akan melakukan sosialisasi lebih dalam kepada perangkat-perangkat desa seluruh Indonesia terkait dengan pengelolaan dana desa. Selain itu, ke depan nanti kepala desa diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam penggunaan dana desa dalam program padat karya tersebut.

"Saya kira seorang kepala desa nantinya tidak bergantung kepada pendamping, tapi dia juga harus bisa melibatkan masyarakat padat karya. Jangan diborongkan, membangun jalan jangan di pasir, di desa itu, saya kira ini yang ke depan. karena mencapai dua kali lipat," pungkas Tjahjo kepada *Okezone.com*. (MSR)



Gereja Yasmin SKB Syarat Pendirian Rumah Ibadah Perlu Ditinjau Ulang

JAKARTA - Keberadaan Gereja Yasmin yang berada di lokasi perumahan taman Yasmin, Jalan Abdulan bin Nuh, Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor dianggap menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Para Jemaah selama lebih dari tujuh tahun terombang-ambing dalam ketidakpastian hukum atas penyegelan dan penutupan rumah ibadah mereka oleh Pemerintah Kota Bogor. Pemkot Bogor menyebut pengurus GKI Yasmin melakukan pemalsuan tanda tangan dalam surat persetujuan warga untuk mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, tidak tinggal diam, Mendagri terus mengupayakan agar persoalan tersebut bisa secepatnya selesai. Dikutip dari laman *Merdeka.Com*, Mendagri akan terus melakukan koordinasi

dengan Pemkot Bogor untuk membahas persoalan tersebut.

Upaya lain yang dilakukan Mendagri adalah wacana peninjauan kembali terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang menurutnya perlu di revisi. Kepada *Kompas.com*, Mendagri mengatakan, perlunya dilakukan revisi tentang syarat pendirian rumah ibadah yang diatur dalam SKB terkait kewajiban memperoleh persetujuan 90 orang di sekitar lokasi tempat akan dibangunnya rumah ibadah.

Mendagri berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang akan membangun rumah ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Menurutnya jangan sampai SKB tersebut justru menimbulkan konflik antar umat beragama.

Dalam waktu dekat, Mendagri akan berkoordinasi dengan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas mengenai hal ini. (MSR)



Revisi UU Pilkada Disambut Baik

JAKARTA - Dalam rapat dengar pendapat bersama komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 18/1, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyetujui usulan revisi UU Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kepada harian *Media Indonesia* Tjahjo mengatakan, pemerintah berharap revisi UU bisa diselesaikan secepat mungkin sebelum Agustus tahun ini, agar regulasi Pilkada 2017 sudah benar-benar siap.

Keinginan merevisi UU Pilkada di sambut baik Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman. Ia mengatakan kepada harian *Media Indonesia*, Dewan meminta supaya revisi diusulkan atas inisiatif pemerintah, ia juga sepakat perlu ada perbaikan legislasi supaya kesiapan pilkada selanjutnya lebih matang. Revisi juga harus bisa menjawab berbagai macam masalah teknis Pilkada 2015.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni. Menurutnya revisi harus rampung sebelum April 2016, dikarenakan tahapan pilkada sudah akan dimulai sejak April, pembahasan revisi harus sudah dimulai sejak saat ini. Menurut dia, UU Pilkada 2015 merupakan produk kebijakan yang lahir tergesa-gesa sehingga banyak menyisakan persoalan mendasar.

Syarat Dukungan Dibatasi

Salah satu isu strategis yang diusulkan Kemendagri dalam revisi UU Pilkada 2015 tentang pemilihan kepala daerah adalah penetapan batas atas syarat dukungan

parpol atau gabungan parpol.

Kepada harian *Kompas*, Tjahjo mengatakan, selama ini UU Pilkada hanya mengatur batas minimal dukungan parpol dan gabungan parpol dalam mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga berimplikasi adanya pasangan calon yang memborong parpol dan mendapat dukungan sampai 100 persen sehingga berakibat pula pada tertutupnya peluang bagi pasangan lain untuk maju.

Sementara itu, kepada harian yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edi mengatakan, revisi UU Pilkada juga sebaiknya mengatur kembali putusan MK yang mewajibkan anggota DPRD, anggota DPR, PNS, dan anggota TNI mundur jika maju dalam pilkada yang menurutnya putusan tersebut justru sebagai penyebab adanya calon tunggal.

Lukman juga mengusulkan, selain batas dukungan, hal yang perlu direvisi dalam UU Pilkada tersebut antara lain soal pendanaan pilkada yang harus diubah dari APBD menjadi APBN, konsep petahana juga harus diperjelas, serta penetapan waktu pemungutan suara untuk pilkada serentak tahun 2020, 2022, dan 2023. (MSR)

Jokowi, antara Keperkasaan dan Kekhawatiran

Pada awal pemerintahannya, Jokowi hanya didukung empat parpol. Enam parpol lainnya berada dalam barisan oposisi. Tetapi, hanya dalam tempo satu tahun lebih, satu per satu lawan politiknya itu menyatakan dukungan. Sebagai kader Banteng, kondisi ini memperlihatkan bahwa Jokowi memang banteng yang kuat alias perkasa.

Saat maju dalam pilpres 2014, parpol yang mendukung Jokowi hanyalah PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Lawan politiknya adalah KMP atau Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto. Peserta KMP ini adalah Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, plus Demokrat. Untuk Demokrat memang tidak secara resmi masuk KMP. Tetapi, saat pemilihan ketua DPR dan MPR, Demokrat gabung dalam KMP.

Namun, kini KMP hanya tinggal nama. Satu per satu anggotanya menyatakan dukungan ke pemerintahan Jokowi. Dimulai dari PPP, walau hanya salah satu kubu, kemudian PAN, dan yang terakhir Golkar. Dukungan partai Golkar ditunjukkan melalui plakat pakta dukungan. Pernyataan dukungan secara simbolik itu diserahkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di atas panggung di hadapan peserta Rapimnas Partai Golkar pada ujung Januari lalu.

Fakta itu jelas menunjukkan, setidaknya ada empat faktor yang membuat lawan politik Jokowi tidak berdaya. Pertama, Jokowi tidak terpengaruh dengan manuver politik kelompok oposisi. Kebijakannya seperti kartu sakti, vonis mati bandar narkoba, dan juga

kenaikan BBM terus dilakukan meski diprotes oleh sebagian lawan politiknya. Kedua, Jokowi punya sikap terbuka untuk berkomunikasi dengan semua parpol. Bahkan, dengan Prabowo, yang merupakan lawannya pada pilpres dulu, Jokowi tetap menjalin komunikasi dengan baik.

Ketiga, ada kondisi internal parpol yang goyang. Golkar dan PPP adalah contoh yang jelas. Perlawanan frontal mereka ke pemerintahan Jokowi untuk dapat pengesahan selalu kandas. Akhirnya, tidak punya pilihan kecuali mendukung pemerintahan Jokowi. Keempat, Jokowi punya operator politik yang andal. Operator ini mampu menghubungkan Jokowi dengan parpol oposisi itu. Operator ini juga yang mampu menjinakkan manuver di DPR. Impaknya, kelompok oposisi tidak berdaya. Manuver yang mereka lakukan tidak berhasil, sehingga mereka memilih bergabung. Dan, Jokowi pun tampak makin perkasa.

Kendati begitu, keperkasaan Jokowi menaklukkan lawan-lawan politiknya patut diingatkan. Sejatinya, koalisi tambun yang sedang dibangun Jokowi, pada batas tertentu bisa membahayakan demokrasi dan efektivitas pemerintahan. Penampungan lawan menjadi kawan politik secara massif akan memicu politik balas jasa. Politik balas budi berlebihan tentu dapat meningkatkan kerepotan, kerumitan, dan ongkos politik pemerintahan selama empat tahun ke depan.

Jokowi juga berpotensi tidak bisa bersikap tegas terhadap kasus-kasus konflik kepentingan (*conflict of interests*) dalam pemerintahannya yang pada batas tertentu lagi dapat membatasi efektivitas manajemen pemerintahan dan kebijakan. Selain itu, dikhawatirkan Jokowi akan terlampaui berhati-hati, lamban, dan konservatif dalam mengelola pemerintahan.

Moh. Ilham A. Hamudy





UPDATE INFORMASI
KELITBANGAN
CUKUP DALAM SATU
GENGGAMAN



WWW.BPP.KEMENDAGRI.GO.ID

call for papers

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Terakreditasi No.531/AU1/P2MI-LIPI/04/2013

**Kami mengundang
PENELITI, DOSEN, dan PEMERHATI PEMERINTAHAN
menyumbangkan karya tulis ilmiahnya
ke Jurnal Bina Praja**

SUB TEMA

- 1 OTONOMI DAERAH DAN BIROKRASI
- 2 POLITIK DAN PEMERINTAHAN
- 3 ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DAN PEMERINTAHAN DESA
- 4 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- 5 INOVASI DAERAH
- 6 PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
- 7 BERBAGAI ISU PEMERINTAHAN LAINNYA

SYARAT

- DIBUKA SECARA UMUM
- NASKAH DAPAT BERUPA HASIL PENELITIAN MAUPUN KAJIAN PEMIKIRAN
- NASKAH HARUS SESUAI DENGAN TEMA DAN SUB TEMA YANG TELAH DITENTUKAN OLEH TIM REDAKSI JURNAL BINA PRAJA
- NASKAH YANG DIKIRIM BELUM DIPUBLIKASIKAN MEDIA LAIN
- PANJANG NASKAH 7000 - 8000 KATA DALAM BAHASA INDONESIA ATAU BAHASA INGGRIS (LEBIH DISUKAI DALAM BAHASA INGGRIS)

KETENTUAN

- SISTEMATIKA DAN FORMAT PENULISAN LIHAT <http://ejournalbpp.com>
- DAFTAR PUSTAKA MINIMAL 10 BUAH YANG BERSUMBER DARI SUMBER PRIMER (NASKAH JURNAL ILMIAH, DISERTASI, TESIS, SKRIPSI, DAN/ATAU LAPORAN PENELITIAN LAINNYA)
- LAMPIRKAN BIODATA BESERTA ALAMAT LENGKAP SURAT MENYURAT DAN NOMOR TELEPON YANG BISA DIHUBUNGI

**Kirimkan Karya Tulis Ilmiah Anda
dengan Tema
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
ke jurnalbinapraja@yahoo.com**



*Tim Redaksi Jurnal Bina Praja
Jl. Kramat Raya No. 132
Senen - Jakarta Pusat
jurnalbinapraja@yahoo.com*